ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2024 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

YENNY WIDIA ASTUTY
NIM. 3222084

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2026 M

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman"**. Kemudian shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita menjadi manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata Satu Ekonomi Islam untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, pertama sekali kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda **Kostan Japari** dan Ibunda **Nur Afsoh** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan, dan memberikan motivasi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si** selaku rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta Bapak/Ibu Wakil Rektor.
2. Bapak **Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu **Rika Widianita, SE., ME** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu **Dr. Rini Elvira, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing, mengarahkan, mengajarkan penulis dalam bidang akademik.
5. **Khadijah Nurani, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu beserta Staf serta jajaran Kantor Wali Nagari Padang Gelugur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada Nenek, Etek, Udak, Mamak, Bou, Uwak, Abang/Kakak Sepupu yang selalu mendukung, membantu dan juga memberikan motivasi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

10. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 2026
Penulis

YENNY WIDIA ASTUTY
3222084

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
F. Penjelasan Judul 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Dana Desa 13
1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa 13
2. Tujuan Pengelolaan Dana Desa 15
3. Manfaat Pengelolaan Dana Desa 15
4. Indikator/Tolak Ukur Pengelolaan Dana Desa 16

B. Ekonomi Islam 18
1. Pengertian Ekonomi Islam 18
2. Tujuan Ekonomi Islam 21
3. Manfaat Ekonomi Islam 21
4. Indikator/ Tolak Ukur Ekonomi Islam 22

C. Pengelolaan Dana Desa di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam 22
1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa di Tinjau Dari Perspektif

Ekonomi Islam 22
2. Tujuan Pengelolaan Dana Desa di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam 24
3. Manfaat Pengelolaan Dana Desa di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam 25
4. Indikator/ tolak ukur Pengelolaan Dana desa 27

D. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa 30

E. Kajian Terdahulu 34

BAB III Metode penelitian

A. Jenis penelitian 43
B. Waktu dan Lokasi penelitian 43
C. Jenis dan sumber data 44
D. Informan Penelitian 46
E. Teknik Pengumpulan data 46
F. Teknik Analisis Data 47

BAB IV Hasil Penelitian

A. Gambaran umum penelitian 49
1. Profil Nagari Padang Gelugur 49
2. Peta dan Sruktur Kepengurusan Wali Nagari 52
3. Data Penduduk Berdasarkan Jorong 54
4. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 55
5. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 56
6. Sarana atau Fasilitas Nagari Padang Gelugur 57
7. Kondisi Sosial Nagari Padang Gelugur 57

B. Hasil penelitian 58
1. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur Berdasarkan Perencanaan, Pelaksanaan, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keadilan 58
2. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur

Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Berdasarkan Amanah, Keadilan, Tauhid, Maslahah/manfaat, dan Khalifah/Manusia 78
3. Faktor Penghambat yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Dana Desa 99

C. Hasil Pembahasan 120

1. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman Berdasarkan Perencanaan, Pelaksanaan, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keadilan 120
2. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Berdasarkan Amanah, Keadilan, Tauhid, Maslahah/manfaat, dan Khalifah/Manusia..... 130
3. Faktor Penghambat yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Dana Desa 145

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 158
B. SARAN 160

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Transfer Dana Desa Nagari Padang Gelugur Tahun 2024 4

Tabel 1.2 Anggaran Belanja Dana Desa Perbidang di Nagari Padang Gelugur Tahun 2024 6

Tabel 4.2 Data Penduduk Berdasarkan Jorong 54

Tabel 4.3 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 55

Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pasaman, Kecamatan Padang Gelugur, Nagari Padang Gelugur 52

Gambar 4. 2 Struktur Kepengurusan Kantor Wali Nagari Padang Gelugur 52

Gambar 4.3 Wawancara Bersama Kepala Wali Nagari Padang Gelugur

Gambar 4.4 Wawancara Bersama Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur

Gambar 4.5 Wawancara Bersama Masyarakat Nagari Padang Gelugur

Gambar 4.6 Wawancara Bersama Masyarakat Nagari Padang Gelugur

Gambar 4.7 Wawancara Bersama Masyarakat Nagari Padang Gelugur

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)"** ini disusun oleh **Yenny Widia Astuty dengan NIM 3222084** Mahasiswa Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang harus dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nagari Padang Gelugur sebagai salah satu penerima Dana Desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Nagari Padang Gelugur, menganalisis pengelolaan Dana Desa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Keuangan, Ketua Bamus, pendamping desa, dan masyarakat Nagari Padang Gelugur. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Nagari Padang Gelugur telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dengan cukup baik. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, Pengelolaan Dana Desa telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tauhid, maslahah, dan khalifah, meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia aparatur nagari, kurang optimalnya transparansi informasi kepada masyarakat, hambatan teknis dalam pelaksanaan kegiatan, kurang maksimalnya proses audit dan evaluasi, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang mempengaruhi partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur nagari, penguatan transparansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan Dana Desa dapat memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan yang lebih optimal sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Dana Desa, Ekonomi Islam*.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Pembangunan ekonomi tidak hanya beriorentasi pada pertumbuhan pendapatan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup, pemerataan distribusi pendapatan, serta pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan pedesaan menjadi sangat penting karena desa merupakan basis utama kehidupan masyarakat di negara berkembang termasuk indonesia yang masih mengahadapi kesenjangan akases terhadap infrastruktur, pendidikan, dan peluang ekonomi.

Upaya pembangunan ditingkat desa sudah digulirkan sejak lama. Salah satu upayanya dapat dilihat dari adanya bantuan pemerintah berupa alokasi dana desa. Dana desa ini diambil dari 10% dana APBD, dan telah dilakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang ini pula, pembangunan desa bisa dilakukan untuk masing-masing desa dan harus mampu mengelola dana desa yang diberikan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran [1].

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat

[1] Abdul Manandan Wahyunadi, *BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa* (Inovasi Pembangunan Desa, 2019).

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat [2].

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (PP 60/2014), PP 60/2014 mengatur detail teknis penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN ini seperti pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa melalui pengalokasian hingga pengawasan. Peraturan ini menjadi acuan teknis utama bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) [3].

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 113/2014), Permendagri 113/2014 merupakan aturan fundamental yang secara khusus mengatur bagaimana keuangan desa dikelola mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Regulasi ini memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai peraturan perundang-undangan lainnya[4].

---

[2] Nova Sulastri, *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Wotupute Kabupaten Muna* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, 2016).

[3] Tambahan Lembaran dan Negara Republik, 2014.

[4] Menteri Dalam dan Negeri Republik, 2014, hal. 1–16.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 dan PMK Nomor 108 Tahun 2024, Kedua Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk menyesuaikan tata kelola dana desa dengan kebijakan fiskal nasional, sistem transfer ke daerah, serta kebutuhan pembangunan desa yang semakin dinamis[5].

Di dalam Al-Qur'an konteks pengelolaan dana desa dapat diaplikasikan dengan cara memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Berikut penjelasanya dalam Q.S Al-Ma'idah 5:8 sebagai berikut.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi oran-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengaetahui apa yang kamu kerjakan* (Q.S Al-Ma'idah 5:8).

Dalam konteks Pengelolaan Dana Desa, ayat ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Dana Desa merupakan amanah publik yang bersumber dari keuangan negara dan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa diskriminasi aparatur desa memiliki kewajiban mengelola dana desa secara

[5] Pengelolaan Dana Desa dan Tambahan Lembaran, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa," 2023, hal. 1–56.

transparan, akuntabilitas, serta partisipasif dan dapat mempertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral.

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Pengelolaan keuangan publik termasuk Dana Desa harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti amanah (tanggung jawab), Keadilan (‘adl), Manusia (khalifah), Maslahah (kemaslahatan) dan Tauhid.

Berikut adalah Bagian-bagian Pendapatan transfer Dana desa di Nagari Padang Gelugur, kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Tabel 1. Pendapatan Transfer Dana Desa Nagari Padang Gelugur 2024

Uraian	**Anggaran (Rp)**	**Anggaran (%)**	**Realisasi (Rp)**	**Lebih/Kurang (Rp)**
Dana Desa (Trasnfer)	Rp. 1.681.831.000,00	59,27%	Rp. 1.681.831.000,00	Rp. 0,00
Bagi Hasil Pajak dan Redistribusi	Rp. 27.169.354,00	0,96%	Rp. 0,00	Rp.27.169.354,00
Alokasi Dana Desa (Transfer)	Rp. 1.114.162.100,00	39,27%	Rp. 1.114.162.100,00	Rp. 0,00
Pendapatan Lain-lain	Rp. 14.000.000,00	0,49%	Rp. 12.314.319,00	Rp. 1.685.681.00
Jumlah Pendapatan	**Rp. 2.837.162.454,00**	**100%**	**Rp. 2.808.307.419,00**	**Rp. 28.855.035,00**

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Gelugur 2024[6].

[6] *Kantor Wali Nagari Padang gelugur*, 2024.

Berdasarkan Tabel 1. di atas Pendapatan Transfer Dana Desa untuk tahun anggaran 2024 tersebut bagian ini meliputi Dana Desa sebesar Rp 1.681.831.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 1.114.162.100,00, yang keduanya berfungsi sebagai dasar penting untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa. Dengan jumlah anggaran yang begitu besar seharusnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ini bisa dimanfaatkan sebagai modal untuk menciptakan kegiatan produktif salah satunya dari sisi kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang merupakan salah satu penggerak ekonomi lokal dan sebagai instrumen utama dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional guna meningkatkan pendapatan Nagari.

Selain itu, desa juga memperoleh pendapatan dari pajak dan retribusi yang totalnya mencapai Rp 27.169.354,00. Meskipun jumlah ini tergolong kecil, komponen ini menunjukkan kontribusi dari aktivitas ekonomi lokal yang dikelola melalui sistem pajak daerah dan retribusi.

Selain itu, desa juga memperoleh Alokasi Dana Desa yang totalnya mencapai Rp. 1.114.162.100,00 Alokasi Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai dana operasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kecenderungan penggunaan Alokasi Dana Desa lebih dominan pada belanja aparatur, sehingga aspek pemberdayaan masyarakat kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam alokasi agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara menyeluruh.

Selanjutnya, terdapat jenis pendapatan lain-lain yang mencapai Rp 14.000,000,00, yang berasal dari sumber di luar transfer dan tidak rutin, seperti hasil usaha desa, sumbangan, atau dukungan dari masyarakat. Jumlah pendapatan lain-lain yang relatif kecil menunjukkan bahwa kemampuan desa untuk menghasilkan pendapatan asli perlu ditingkatkan dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah anggaran pendapatan lain-lain sebesar Rp. 14.000.000, dari jumlah tersebut yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 12.314.319,00. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp. 1.685.681,00, yang menunjukkan bahwa target pendapatan tidak tercapai secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi dalam pengelolaan keuangan desa[7].

Tabel 2. Anggaran Belanja Dana Desa Perbidang di Nagari Padang Gelugur 2024

No	Belanja	Anggaran (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 60.214.255,61
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.219.175.000,00
3	Bidang Penanggulanngan Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp. 417.600.000,00
4	**Total**	**Rp. 1.696.989.255,61**
5	**Surplus/Defisit**	**Rp. 15.158.255,61**
6	**SiLPA Tahun Sebelumnya**	**Rp. 20.158.255,61**

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Gelugur 2024

[7] Abdul Halim, *Akuntasi Keuangan Daerah* (Salemba Empat, 2014).

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), total belanja yang dianggarkan sebesar Rp1.696.989.255,61 yang dialokasikan ke dalam beberapa bidang sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Nagari. Rincian alokasi belanja tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari lebih memprioritaskan kegiatan pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memperoleh alokasi sebesar Rp60.214.255,61**.** Anggaran ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan nagari, seperti kegiatan administrasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan musyawarah, serta berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan

Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan nilai sebesar Rp1.219.175.000,00. Besarnya alokasi anggaran pada bidang ini menunjukkan bahwa pembangunan menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana nagari. Anggaran tersebut umumnya digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan lingkungan, drainase, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta berbagai sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pemerintah nagari juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp417.600.000,00 untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak**.** Alokasi ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah nagari terhadap aspek perlindungan sosial dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kondisi yang tidak terduga. Dana tersebut dapat digunakan untuk penanganan bencana

alam, keadaan darurat, maupun pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan total pendapatan nagari sebesar Rp1.681.831.000,00, maka total belanja yang direncanakan sebesar Rp1.696.989.255,61 menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp15.158.255,61. Defisit tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belanja nagari lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima pada tahun anggaran tersebut. Kondisi ini umumnya dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan yang sah, seperti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Pengelolaan Dana Desa tidak hanya beriorentasi pada kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga menekaankan tanggungjawab moral kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu dalam setiap Kegiatan Pengelolaan Dana Desa dituntut untuk menjalankan amanah secara jujur, mengelokasikan anggaran secara adil sesuai kebutuhan masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses musyawarah yang diadakan pemerintah nagari.

Berdasarkan uraian masalah diatas mendorong peneliti untuk meneliti tentang **"Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (2024) (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Belum tercapainya target pendapatan Nagari.
2. Belum maksimalnya Pemanfaatan Dana Desa.
3. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam.

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten pasaman?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur DiTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, kabupaten pasaman?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah yang telah dibahas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

a. Untuk menganalisis Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten pasaman.
b. Untuk Mengetahuhiu Tinjauan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur DiTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.
c. Untuk Mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, kabupaten pasaman.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah dan memperkaya khasanah keilmuan tentang pelaksanaan Analisis Pengelolaan Dana Desa di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.
b. Manfaat Praktis, Untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis dibidang ekonomi khususnya Pengelolaan Dana Desa di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan, mengenai masalah-masalah yang ada, Bagi Masyarakat.

F. Penjelasan Judul

Sebelum menjelaskan kajian ini lebih detail, ada baiknya kita perjelas dulu maksud judulnya agar tidak terjadi kesalah pahaman. Judul penelitian ini adalah "*Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman*." Dengan adanya penjelasan yang ditambahkan pada defenisi judul, diharapkan dapat menghilangkan kesalah pahaman pembaca ketika memutuskan studi selanjutnya. Ketentuan yang perlu di perjelas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan: Suatu bentuk kerja dengan orang-orang secara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), pengelolaan berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan berusaha menjadi lebih baik, lebih maju, dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan[8].

[8] Rieke Sri Rizki Asti Karini, *Buku Ajar Audit Manajemen* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

2. Dana Desa: Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaaan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat [9].

3. Ekonomi Islam: Sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum-hukum Islam atau syariah. Pengertian ekonomi syariah mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan.[10]

Jadi secara keseluruhan judul ini merujuk pada sebuah kajian atau penelitian yang menganalisis Pengelolaan Dana Desa yang ada di Nagari Padang Gelugur. Analisis ini di tinjau dari perspektif ekonomi Islam, yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam ke dalam pemahaman ekonomi seperti keadilan, amanah, khalifah (manusia), tauhid dan maslahah.

[9] Septianingsih, Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa, Vol.16. No. 1 (2021).

[10] Mustofa Tohari Dkk, Implementasi Akhlak Al Karimah Dalam Kurikulum Ekonomi Islam: Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2 (2024), Hal. 2.

BAB II

TINJAUAN PUUSTAKA

A. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan aspek yang penting dan mendasar bagi pemerintah desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dan partisipatif keuangan desa. Maka pengelolaan Dana Desa sama artinya dengan mengelola APBDesa yang selama pengelolaannya semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari pencarian potensi dan kebutuhan desa, perencanaan APBDes (dimana dana desa termasuk di dalamnya), pelaksanaan, pengawasan, penatausahaan, pelaporan[11]. APBDesa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan[12]. Peraturan tersebut memiliki beberapa tahapan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan umum, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam

[11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1.

[12] Khadijah Nurani, Analisis Kinerja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Pada Pemerintahan Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, Vol. 6 No. 4 (2025), hal.265

pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan[13].

3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan di catat dalam buku-buku tententu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa[14].

4) Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanan APBDes kepala Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laopran semester akhir tahun. Pengelolaan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dimana dalam pengelolaanya dilakukan dalam kerangka pengelolaan

[13] Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, hal.63

[14] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan keuangan Keuangan Desa ,hal.90

keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas seperti Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif[15].

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukkan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa[16].

2. Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis, adil, makmur dan sejahtera sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah.

1) Meningkatkan pelayanan publik desa.
2) Mengentaskan kemiskinan
3) Memajukan perekonomian masyarakat
4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5) Memperkuat Masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan[17].

3. Manfaat Pengelolaan Dana Desa

1) Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan

[15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37.

[16] Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hal.10

[17] Icuk Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), hal. 26

kemasyarakatan. Contohnya pembangunan jalan desa, jembatan, fasilitas pendidikan (seperti sekolah dan balai desa).

2) Dana desa di proritaskan untuk peningkatan layanan publik desa. Contohnya meningkatkan fasilitas kesehatan dengan membangun posyandu, puskesmas desa, atau sarana kesehatan lainnya.
3) Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
4) Dana Desa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
5) Dana Desa digunakan untuk mengurangi kemiskinan[18].

4. Indikator/Tolak Ukur Pengelolaan Dana Desa

1) Perencanaan.

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan selama proses implementasi dan pengawasan. Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat umum[19], seperti kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat desa, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keselarasan program dengan RPJMDes dan RKPDes, Prioritas pada kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

[18] Sulton Dkk, *Dana desa* (Ruang Karya, 2024).
[19] Ni Nyoman Resmi Dkk, *Pengantar manajemen*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semata Media, 2022), hal.53.

2) Pelaksanaan.

Pelaksanaan adalah suatu cara yang dilaksanakan pimpinan supaya menggrakan, mengarahkan, intruksi, koordinasi, dan memotivasi anggota organisa untuk mau bekerja agar mencapai tujuan yang di inginkan[20], seperti ketapatan penggunaan Dana Desa sesuai rencana, Efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan, Kesesuain anggaran dengan output kegiatan, Tidak adanya penyimpangan.

3) Transparansi.

Tansparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan banwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan[21], seperti keterbukaan informasi penggunaan dana desa.

4) Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi

[20] Mulyadi Dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Manajemen*, (Riau: Dotplus Publidher, 2021), hal.54.
[21] Dadang Suwanda Dkk, *Manajemen Risiko*, (PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal.44.

untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang[22], seperti kesesuaian laporan dengan realisasi kegiatan dana desa.

5) Keadilan.

Keadilan adalah pengelolaan data harus adil dan tidak diskriminatif. Organisasi harus menghindari penyalahgunaan data untuk tujuan tidak terjadinya diskriminatif atau keuntungan yang tidak adil atau tidak merata[23], seperti bantuan atau program disalurkan dengan adil tanpa melihat kelompok atau golongan tertentu, masyarakat miskin atau kelompok rentan sama-sama memperoleh akses yang sama.

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomia* dari kata "*oikos*" dan "*nomos*". *Oikos* berarti "keluarga atau rumah tangga (*household*)". Sedangkan "*nomos*" berarti "peraturan, aturan, hukum". Dengan demikian secara umum, ekonomi dapat diartikan sebagai "suatu aturan dalam rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga". Rumah tangga dalam hal ini bisa saja

[22] A. Rudiana, *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*, (Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2021), hal. 20.

[23] Made Sudarma, *Manajemen Data*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 452.

berarti rumah tangga keluarga, perusahaan, desa, wilayah atau bahkan sebuah negara.

Istilah ekonomi dalam literatur bahasa Arab dikenal dengan istilah "*al-iqtishad al-Islami*". Iqtishad berasal dari kata "*qosdun*" yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*). Kata "*al-qashdu*" di dalam Alquran terdapat dalam Qs. Al-maidah ayat 66:5 sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ٦٦

Artinya:

> *Seandainya mereka menegakkan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus. Sementara itu, banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan*. (Qs. Al-maidah ayat 66:5).

Beberapa definisi ekonomi Islam yang diberikan oleh para pakar, diantaranya:

1) Monzer Kahf, menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dan tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu lain yang berfungsi sebagai *tool of analysis* (matematika, statistik, logika, *qawaid fikiyah*, dan *ushul fiqih*).

2) M.A Manan, berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan lengkap berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu: *Alquran, sunah, ijmak,* dan *qiyas*.
3) Umar Chapra, mengartikan ekonomi Islam sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan *maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat.
4) *An-nabhani*, mendefinisikan ekonomi islam adalah studi tentang pengelolaan harta benda menurut persfektif Islam.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi baik yang meliputi alokasi dan distribusi dari berbagai sumber daya yang ada dan diimplementasikan sesuai prinsip-prinsip *Alquran, hadis, ijmak,* dan *qiyas* dalam mewujudkan kesejahteraan umat[24].

[24] Delima Sari Lubis Dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2022), hal 20-25.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan dari ekonomi islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, di mana kekayaan didistribusikan secara adil dan aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral Islam ke dalam kehidupan ekonomi, sehingga membantu menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi semua. Tujuan ekonomi islam mencerminkan aspirasi untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan ekonomi Islam untuk menekankan pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat[25].

3. Manfaat Ekonomi Islam

Ekonomi islam tidak hanya menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika, tetapi juga membawa berbagai manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara luas. Manfaat ini dirasakan baik oleh individu, masyarakat, maupun negara, karena ekonomi islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan yang menciptakan tatanan ekonomi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan[26].

---

[25] M. Husni Ingratubun, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Makasar: Reads Media Croup, 2024), hal. 11-13.

[26] Feri Irawan Dkk, *Ekonomi Syariah (Teori & Aplikasi Ekonomi Islam)* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2025), hal.23-25.

4. Indikator/Tolak Ukur Ekonomi Islam

Indikator ekonomi islam adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, Indikator ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan aspek pertumbuhan, tetapi juga aspek keadilan sosial, distribusi kekayaan, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan. Indikator-indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa serta keberlanjutan perekonomian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penerapan nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial[27].

C. Pengelolaan Dana Desa di Tinjau Dari perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa di Tinjau Dari perspektif Ekonomi Islam.

Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam bukan hanya menenkankan pada ketepatan administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menekankan nilai moral dan spritual dalam pengelolaannya agar Dana desa benar-benar memberikan manfaat, keadilan dan kesejahteraan bagi masyaraakat.

Secara umum ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi yang berlandaskan syariah islam

[27] Ahmad Fauzi Dkk, *konsep Dasar Ekonomi dan Keuangan syariah*, (Padang: Takaza Innovatix Labs (IKAPI), 2025), hal.173-177.

yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah dan ad juga tauhid, khalifah maslahah, keadilan dan amanah[28].

Dalam Pengelolaan Dana Desa ini jika dilihat dari perspektif ekonomi islam dalam QS. Al-Anfal : 27 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui (QS. Al-Anfal :27).

Dari ayat di atas Bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada ummat-nya, agar Menjalakan tugas harus sesuai dengan amanah yang telah di percayakan oleh masyarakat kepada kita, karena apabila masyarakat telah memberi amanah kepada kita berarti kita mampu untuk menjaga amanah-nya dan apabila masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada kita maka kepercayaan itu jangan di khianati. Amanah dan Kepercayaan yang telah di percayakan oleh kita, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak menerima dan layak untuk memberikannya sesuai dengan firman Allah sebagaimana yang tercantum dalam QS An-nisa Ayat 58 yang berbunyi:

[28] Rozalinda, Teori dan Aplikasiya Pada Aktivitas Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-nisa : 58).

Dari Ayat diatas telah dijelaskan bahwa apabila kita diberi amanah untuk menegakkan keadilan maka tegakkanlah keadilan itu seadil-adilnya.

2. Tujuan Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi islam

1) Menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi (*al-'adl wa al-musawah*).

Pengelolaan dana desa diarahakan untuk mengurangi ketimpangan antar warga desa melalui program pemberdayaan ekonomi, bantuan usaha produktif, dan penguatan kelompok rentan tanpa membedakan kelompok tertentu.

2) Menjaga amanah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Ekonomi islam menekankan prinsip amanah dan hisab (pertanggungjawaban). Pengelolaan dana desa merupakan titipan negara yang bersumber dari keuangan publik, sehingga

pengelolaannya harus transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral[29].

3. Manfaat Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi islam

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Pengelolaan Dana desa yang sesuai dengan prinsip syariah mendorong pemanfaatan dana desa untuk kegiatan produktif dan halal, seperti pengembangan usaha mikro, pemberdayaan petani dan pelayanan, serta peningkatan kualitas layanan dasar. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus menjalankan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

pengelolaan dana desa yang berlandaskan prinsip keadilan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial. Ketika akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan semakin merata, maka peluang masyarakat untuk berkembang menjadi lebih besar. Hal ini menciptakan efek berantai berupa peningkatan produktivitas, perluasan lapangan kerja, serta pengurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat desa.

[29] Herion Dkk, Pengelolaan Dana Desa Dalam Aspek pemberdayaan DiTinjau Dalam Persfektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Of Graduate Of Islamic Business And Ekonomisc*, Vol.1. No.1 (2022).

Selain itu, dalam kerangka nilai Islam, kesejahteraan yang adil juga berkaitan dengan terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dana desa yang dikelola dengan baik mampu memperkuat solidaritas sosial dan semangat gotong royong di masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun tatanan sosial yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan, sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam yaitu tercapainya kemaslahatan bersama.

2) Meningkatkan Akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Prinsip amanah dan hisab dalam ekonomi islam menuntut pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Dana Desa dikelola secara jujur dan terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat, Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa secara partisipasif.

Selain itu, dalam perspektif Islam, kepercayaan publik juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas, yaitu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam bingkai ukhuwah (persaudaraan). Hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan akan menciptakan stabilitas sosial, mengurangi konflik, serta mendorong kolaborasi dalam berbagai kegiatan

pembangunan. Dengan demikian, akuntabilitas dan kepercayaan publik bukan hanya hasil dari pengelolaan dana desa yang baik, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama [30].

4. Indikator/Tolak Ukur Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi islam

1) Amanah

Dalam Pengelolaan Dana Desa sikap dan perilaku harus dapat dipercaya dalam memegang, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sesuatu yang dititipkan secara jujur, adil dan bertanggungjawab[31]. Seperti mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai perencanaan, tidak adanya penyalahgunaan atau manipulasi anggaran sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hasyr (59) : 7.

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian)*

[30] Muhammad Rudi Wijaya, Pemanfaatan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, Vol. 01. No. 02 (2021), hal. 917–28.

[31] Amalia Husna, *Amanah* (Tinta Media, Creative Imprint Of Tiga Serangkai, 2023).

agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (Q.S Al-Hasyr (59) : 7).

2) Keadilan (Al-'Adl).

Pengelolaan Dana Desa harus menjamin distribusi manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, maupun kelompok tertentu. Keadilan tercermin dari kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan rill masyarakat desa serta pemerataan hasil pembangunan[32]. Seperti Dana Desa dialokasikan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat, Program desa menjangkau kelompok rentan (miskin, lansia) sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) : 58.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat* (Q.S An-Nisa (4) : 58).

[32] Fauzani Dkk, *Teori Keadilan Distribusi Al-'sadr: Kepemilikan dan keadilan Distribusi Praproduksi Sumber Daya Mineral Di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2024).

3) Tauhid

Tauhid merupakan fondasi filosofis yang mendasari seluruh bangunan ekonomi syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh harta dan sumber daya yang ada didunia ini adalah milik Allah SWT semata, sementara manusia hanya sebagai khalifah (pengelola) yang diberi amanah. Seperti Transparansi dalam program masyarakat[33]. Sebagaimana firmal Allah dalam Q.S Al-baqarah (2):163.

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

Artinya: *Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang* (Q.S Al-baqarah (2):163).

4) Maslahah

Maslahah adalah semua aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan manfaat untuk lungkungan masyarakat. Seperti manfaat dana desa dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan bagi masyarakat dan melakukan pembangunan infrastruktur yang merata dan penguatan UMKM yang ada di desa[34]. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 163.

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

[33] Tono Wartono Dkk, *Buku Ajar Ekonomi Syariah* (Sonpedia, 2025).

[34] Rahmat Aji Nuryakin Dkk, *Buku Ajar Pengantar Perbankan Syariah* (Filomedia Pustaka, 2025).

Artinya: *Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang* (Q.S. Al-Baqarah (2) : 163) .

5) Manusia (Khalifah)

Manusia adalah khalifah Allah dimuka bumi yang diberi kuasa oleh Allah untuk memakmurkan buminya. Dalam upaya menjalankan amanahnya dalam perencanaan anggaran, seperti pengelolaan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab, Transparansi dalam keuangan[35]. sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Al- Baqarah (2): 26).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

Artinya: *"Sungguh Allah tidak enggan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Sedangkan mereka yang kafir mengatakan, 'Apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan?' Dengan perumpamaan itu banyak orang disesatkan Allah. Dengan itu pula banyak orang diberi petunjuk oleh-Nya. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik*". (Q.S Al- Baqarah (2): 26).

D. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Aparatur desa merupakan pelaksana utama

[35] Abdur Rohman, *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Insani* (Duta Media Publishing, 2017).

berbagai program pembangunan yang didanai oleh pemerintah, sehingga kemampuan aparatur dalam memahami regulasi, menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Apabila kualitas sumber daya manusia aparatur desa masih terbatas, maka pelaksanaan program pembangunan berpotensi tidak berjalan secara optimal, baik dari segi administrasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan penggunaan anggaran dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, maka fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan Dana Desa menjadi kurang maksimal sehingga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan[36]. Berikut merupakan yang menjadi faktor Penghambat dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Masih Kurang

   Pemerintah Desa menyadari bahwa masih terdapat beberapa pegawai yang kurang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dana APBDes terutama dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa cukup mengalami

[36] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

kesulitan dalam mengerjakan tahap-tahapannya. Terlebih dalam kebijakan dan peraturan yang membutuhkan pemahaman dari setiap aparsstur yang manyoritas sudah berumur, apalagi aparatur desa rata-rata tamatan SMA. Walaupun ada pendampingan dari pemerintah kabupaten yang datangnya hanya pada tahap-tahap awal perencanaan APBDes dalam membantu pekerjaan dana desa membuat aparatur desa harus lebih extra dalam memahaminya.

2) Kurangnya Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Desa umumnya kurang menyosialisasikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat kurang mengetahui berapa jumlah uang yang masuk atau keluuar. Pemerintah desa sering kali juga tidak memajang infoermasi APBDes dalam bentuk baliho agar terlihat jelas mengenai informasi pengelolaan dana desa.

3) Adanya Hambatan Teknis

Realitas menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembangunan infrastrukrur desa yang dibiayai oleh APBDes sering mengahadapi hambatan teknis misalnya kondisi alam yang tidak menentu menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur desa, Apabila terjadi hujan, maka panitia pelaksana harus menunda kegiatan pembangunan infrastruktur desa seihingga pekerjaan menumpuk di akhir. Pemerintah Desa secara umum telah mengusahakan pengelolaan dana APBDes dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Namun tetap saja ada

beberapa hambatan yang dialami dalam proses akhir pengelolaan dana APBDes, yaitu pada bagian pelaporan dan pertanggungjawaban.

4) Kurang Maksimal dalam Proses Audit dan Evaluasi

Dalam tahap pelaporan pemrintah mempunyai rasa kekhawatiran seperti apabila ada kesalahan administrasi yang tidak disengaja dilakukan oleh aparatur desa yang kemudian ditemukan oleh pihak auditor. Dalam proses audit, tahap ini menjadi pemicu rasa kekhawatiran bilamana pihak audit mengkategorikan kesalahan sebagai korupsi. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan uang tetapi kesalahan administrasi juga kadang bisa dikatakan korupsi.

5) Rendahnya Pendidikan Masyarakat Desa

Dalam konteks ini, peran masyarakat merupkan faktor yang penting dalam pembangunan desa, seperti subjek maupun objek kemajuan perekonomian desa, pemberdayaan masyarakat desa belum berpartisipasi dan kurang memiliki pengetahuan perihal perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan dana desa sehingga demokrasi ditingkat desa menjadi lemah. Hal ini disebabkan, rata-rata pendidikan masyarakat desa memiliki pendidikan yang rendah sehingga kurang mengerti akan pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa[37].

[37] Fadillah Amin, *Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, dan APBDes* (Deepublish Digital CV Budi Utama, 2021), hal 75-79.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan suatu sumber yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Kajian terdahulu yang digunakan berasal dari jurnal dan skripsi dengan melihat hasil penelitiannya dan akan dibandingkan dengan penelitian selanjutnya dengan menganalisis berdasarkan waktu yang berbeda. Berikut ini tabel kajian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Junal/ Skripsi
1	Reza Fahlevi (2020)	Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Kuta Barat Kota Sabang.	Metode penelitian yang digunkan adalah penelitian kuantitatif.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: variabel ‘adl (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), variabel transparansi (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), ma’ad (variabel X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), variabel ‘adl(X1), variabel transparansi (X2) dan variabel ma’ad (X3) secara simultan atau	Skripsi

				bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)[38]. Persamaan: Pada Peneliitian ini sama-sama menjelaskan pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi islam. Perbedaan: Terletak pada metode penelitan, objek yang diteliti, lokasi, waktu dan tahun pelaksanaan penelitian.	
2	Sopriyanto (2021)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Persfektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)	Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal, dengan menggunakan pendekatan penelitiaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal memakai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasif. Hal ini menunjukkan kesesuaian	Sinta 6

[38] Reza Fahlevi, *Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Kuta Barat Kota Sabang* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, 2020).

			kualitatif deskriptif.	dengan sistem ekonomi syariah [39]. Persamaan: Pada penelitian ini sma-sama menjelaskan pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi islam. Menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Terletak pada objek yang diteliti, lokasi, waktu dan tahun pelaksanaan penelitian.	
3	Aan Sumantri, Wulan Purnama Sari, Arnadi (2022)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi DI Desa Setalik Kecamatan Sejangkung Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (field research) dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan	Hasil penelitian ini anggaran yang bersumber dari APBN yang bernama Dana Desa (DD) harus dimaksimalkan dalam rangka pembangunan desa untuk menjadi lebih baik. Pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang sesuai dengan harapan penerima manfaat pembangunan desa, lebih-lebih dalam pengembangan ekonomi desa. Dengan itu hasil	Sinta 6

[39] Sopriyanto, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)," *Jurnal Ekonomi, Perbankan & Manajemen Syariah*, 3Vol No.1 (2021), hal. 1–16.

			teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Dan menggali melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian setelah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan deskriptif analitis.	rumusan masalah adalah (1) Pengelolaan penggunaan Dana Desa adalah kegiatan yang didesain untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan dan kemerataan pembangunan. (2) Analisis Efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi adalah suatu keberhasilan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi, sehingga Masyarakat dapat merasakan keberhasilan perencanaan Pengelolaan Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi desa, Pembengunan ekonomi	

				atau Pemberdayaan Masyarakat [40]. Persamaan: Pada Penelitian ini sama-sama menjelaskan pengelolaan dana desa. Menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Terletak Pada objek yang diteliti, lokasi, waktu dan tahun pelaksanaan penelitian.	
4	Sari Ayu Olivia (2023)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.	hasil penelitian bahwa pengalokasian dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa telah sesuai dengan prosedur yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dana desa telah sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam, hal ini terlihat dari adanya pengelolaan dana desa yang bersifat Tauhid, Keadilan,	Skripsi

[40] Aan Sumantri, Wulan Purnamasari, Arnadi, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Di Desa Setalik Kecamatan Sejangkung Perspektif Ekonomi Islam *"Jurnal Studi Islam Lintas Negara"*, Vol. 4 No .1 (2022), hal. 13–26.

			Teknik Pengumpulan data dengan cara obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.	TanggungJawab, Transparansi dan Khalifah, karena rincian dananya telah dipaparkan dengan jelas dalam pengalokasian dana yang efektif dan bermanfaat untuk mengembangkan ekonomi umat sesuai dengan pengalokasian anggaran kepada bidang-bidang yang meliputi bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan Masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakat[41]. Persamaan: Pada Penelitian ini sama-sama menjelaskan pengelolaan dana desa. Menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Terletak Pada objek yang diteliti, lokasi, waktu dan tahun pelaksanaan penelitian.	

[41] Sari Ayu Olivia, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

5	Zahra Aliya Jihada, Miftahudin (2024)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Margamukti Penalengan Menurut Perspektif Islam.	Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis menggunankan teknik pengumpulan data Melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.	Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa margamukti kecamatan pangalengan Kabupaten Bandung secara umum cukup efektif dengan anggaran dana Rp. 574,644,260. Secara Perspektif islam desa margamukti sudah menerapkan beberapa proses di dalam mengelola Dana Desanya dengan menerapkan lima prinsip Maqasid Syariah[42]. Persamaan: Pada Penelitian ini sama-sama menjelaskan pengelolaan dana desa. Menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Terletak Pada objek yang diteliti, lokasi,	Sinta 6

[42] Zahra Aliya Jihada,Miftahudin, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Margamukti Pangalengan Menurut Perspektif Islam As-Syirkah : *Islamic Economics & Finacial Journal*, Vol. 3 No. 6 (2024), hal. 760–72.

				waktu dan tahun pelaksanaan penelitian.	
6	Intan Putri Zakia. (2024)	Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar).	Pendekatan yang digunakan peneliti adalah Pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan menggunakan metode analisis regeresi linear berganda dengan responden sebanyak 88 orang. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer melalui pembagian kuesioner kepada masyarakat desa lamme	Hasil Penelitian ini Menyimpulkan bahwa variabel pengelolaan dana desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa lamme garot kecamatan montasik kabupaten aceh besar dan variabel pembangunan infrastrukrur seecara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa lamme garot kecamatan montasik kabupaten aceh besar[43]. Persamaan: Pada Penelitian ini sama-sama menjelaskan pengelolaan dana desa. Perbedaan: Terletak Pada metode penelitian, objek yang diteliti, lokasi, waktu dan tahun pelaksanaan penelitian.	Skripsi

[43] Intan Putri Zakia, *Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, 2024).

			garot kecamatan montasik kabupaten aceh besar.		

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena karakteristik masalah yang dikaji. Masalah tersebut adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana proses Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur dan Pengelolaan Dana Desa tersebut dianalisis dengan menggunakan Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data statistik atau angka, tetapi lebih tentang mendapatkan informasi tentang fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini berusaha memberikan gambarannyata tentang Bagaimana Proses Pengelolaan Dana Desa, hingga masalah umum yang dilapangan. Selanjutnya, hasil tersebut akan di evaluasi dari sudut pandang Ekonomi Islam, yang menekankan amanah, keadilan, tauhid, manfaat dan khalifah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang lebih komprenhensif dengan menampilkan kondisi lapangan seacara keseluruhan dan menghubungkannya dengan konsep normatiif yang ada dalam literatur Ekonomi Islam.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.Wilayah ini sangat menarik untuk diteliti karena masyarakat ingin mengetahui Bagaimana Proses Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur ini dengan jumlah 2 jorong dan 36 jumlah kampung.

Waktu penelitian ini berlangsung selama 5 bulan dari persiapan hingga analisis dan penulisan laporan. Periode ini dibagi menjadi beberapa tahapan untuk memastikan pengumpulan data yang mendalam dan sistematis.

Pada bulan 1-2 peneliti akan melakukan persiapan, termasuk penyusunan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, dan

studi awal literatur yang relevan. Peneliti jjuga akan mulai melakukan observasi awal untuk memahami masalah yang terjadi dan mengenali informan serta mengumpulkan data.

Bulan 3 pengumpulan data utama dilakukan pada tahap ini, yang meliputi wawancara mendalam dengan Kepala wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, dan 3 Masyarakat Nagari Padang Gelugur. Peneliti juga akan melakukan observasi partisipatif di Nagari Padang Gelugur, dimana peneliti terlibat langsung dalam wawancara kepada kepala Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari dan Masyarakat Nagari Padang Gelugur untuk mengamati masalah yang akan muncul.

Bulan 4 Analisis data dilakukan selama bulan keempat. Peneliti akan mengolah data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.

Bulan 5 Penulisan laporan dan penyusunan kesimpulan akhir penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan menyusun laporan penelitian yang menyeluruh dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data diklasifikasikan menjadi kuantitatif (numerik, dapat diukur dan dianalisis statistik, seperti angka atau persentase) dan kualitiatif (deskriptif, non-numerik, seperti opini, teks, atau observasi). Sumber data terbagi menjadi primer (dikumpul langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik, misalnya survei atau wawancara) dan sekunder (diperoleh dari sumber pihak lain yang sudah ada, seperti buku, jurnal, atau data base online)[44].

1. Jenis Data

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitiatif yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal.12.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber innformasi utama untuk mendukung analisis dan kesimpulan, penjelasan lebih lanjut sebagai berikut[45]:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (tidak melalui perantara) baik dari individu atau perseorangan. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer di dapat dari hasil wawancara langsung kepada narasumber yaitu kepada Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari dan 3 Masyarakat yang tinggal di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Data primer ini penting karena memberikan gambaran nyata mengenai Bagaimana Poses Pengelolaan Dana Desa dijalankan dan bagaimana kesesuainnya dengan Prinsip Ekonomi Islam

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur tentang ekonommi islam, fiqh muamalah, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu serta data resmi dari instansi pemerintah yang diperoleh dari kecamatan, Kanator Wali Nagari dan instansi yang terkait lannya. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat hasil temuan dilapangan, memberikan dasar teori yang kuat, serta membantu peneliti dalam membandingkan kondisi empiris dengan teori ekonomi islam yang ada.

[45] Sulaiman Saat, *Pengantar Metedologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Muda, Edisi Revisi*. (Sulawesi Selatan: Pulsaka Almaida), hal. 55

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi fenomena yang berlangsung di lapangan. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan Teknik *Porposive sampling*, peneliti secara sengaja memilih partisipan yang dianggap memiliki karakteristik atau pengalaman yang relevan dengan penelitian untuk informasi. Penarikan informasi akan dihentikan apabila informasi yang didapat sudah memadai yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti seperti:

a. Wali Nagari
b. Sekretaris Wali Nagari
c. 3 Masyarakat Nagari Padang Gelugur

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat kondisi nyata di lapangan terkait program-program pembangunan yang didanai Dana Desa dengan tujuan untuk melihat infrastruktur yang dibangun dengan Dana Desa seperti jalan, irigasi, MCK, air bersih, sarana sosial, dll. Dengan Observasi, peneliti dapat melihat secara langsunng Proses Pengelolaan Dana Desa.

2. Wawancara

   Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan secara lisan dan bertatap muka dengan Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, dan Masyarakat Nagari Padang Gelugur di Nagari Padang Gelugur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Wawancara ini dilakukan agar dapat mengetahui Bagimana Mekanisme Pengelolaan Dana Desa yang ada di Nagari Padang Gelugur, Kecamtan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

3. Dokumen

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti foto informasi Dana Desa, dan publikasi realisasi anggaran. Dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber informasi pelengkap untuk memvalidasi data hasil wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan dengan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disajikan oleh data Menurut Sugiyono bahwa proses analisa data dalam penelitian kualitatif itu dilakukan dalam tiga tahap, yaitu sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Namun dalam prakteknya, analisis data lebih sering dilakukan saat pengumpulan data[46].

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti disini adalah model *interaktif Miles* and *Huberman*. Menurut Sugiyono aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas Adapun aktivitas analisis data meliputi data *rechaction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conchesion drawing verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi) Langkah-langkah analisis data, yaitu

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kesimpulan bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan). Reduksi data bukan hanya sekedar membuang data yang tidak terlupakan, melainkan merupakan upaya yang

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 11

dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis Penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga data yang 57 dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan penelitian kualitatif.

c. Penarikan Kesimpulan (*Drawinng and Verifying Conclusion)*.

Drawing and Verifying Conclusion adalah penarikan kesimplan da verifikasi, yaitu penarikan dan pengujian kesimpulan, penelitian pada dasarnya mengimplementasikan prinsip *inklusif* dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari *display* data yang telah dibuat.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Nagari Padang Gelugur

Menurut cerita pada zaman dahulu Kampung Padang Gelugur sekarang tumbuh sebatang pohon asam gelugur yang didampingi tumbuh subur sehelai padang ilalang yang tingginya hampir menyamai tinggi asam gelugur tersebut, maka berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat sepakat untuk diberi Nama Kampung Padang Gelugur.

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah dan peraturan pemerintah nomor.72 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa maka berobah pemerintah nagari menjadi pemerintah desa di seluruh Indonesia, dan Usulan pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Nagari yang lebih dominan disebut di Propinsi Sumatera Barat akan disejajarkan dengan Pemerintah desa di Indonesia yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengacu dengan Undang-undang tersebut Propinsi Sumatera Barat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat sistem Pemerintahan Kembali ke Nagari.

Maka lahirlah Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari yang disusul dengan peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, maka terbentuklah pemerintahan nagari

Padang Gelugur yang dulunya Padang Gelugur terbentuk 4 desa disatukan menjadi satu Nagari yaitu Nagari Padang Gelugur dan dilaksanakan pemilihan Wali Nagari yang pertama secara demokratis dengan Kepala Pemerintahan yang Pertama yaitu: ADRI UMAR, S.Pd. yang masa jabatannya selama 5 Tahun, dan kemudian disusul dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari Padang Gelugur sampai saat ini masih pejabat Wali Nagari yaitu:

1. Adri Umar, S.Pd s/d Tahun 2007 adalah Wali Nagari Defenitif Pertama.
2. Asrial Arpani, S.STP sampai 2008 adalah Penjabat Wali Nagari
3. Yaulfahri sampai Juni 2009 adalah Penjabat Wali Nagari
4. Tasrin Yules, SH sampai Mei 2010 adalah Penjabat Wali Nagari
5. Khairul Sani mei 2010 sampai Juli 2011 adalah Penjabat Wali Nagari
6. Saharuddin Mdh Juli 2011 s.d Juli 2017 adalah Penjabat Wali Nagari
7. Syafrial R. S.Pd November 2023 adalah Penjabat Wali Nagari

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wali Nagari Padang Gelugur, Sekretaris Wali Nagari dan Juga Masyarakat Nagari Padang Gelugur, Kantor Wali Nagari ini berdiri secara resmi pada tahun 2002. Awalnya, pemerintahan di wilayah tersebut berbentuk pemerintahan desa, namun seiring berkembangnya sistem pemerintahan daerah di sumatera barat, status Desa berubah menjadi Nagari sehingga dibentuklah Kantor Wali Nagari Padang Gelugur sebagai pusat penyelenggaraan Pemerinthan Nagari.

Secara geografis luas Nagari Padang Gelugur berkisar 40 km^2. Jumlah penduduk yang ada di Nagari Padang Gelugur keseluruhannya berjumlah 16.616 jiwa, yang terdiri dari 9.110 jiwa laki-laki dan 7.506 jiwa perempuan. Jumlah Kepala keluarga pada jorong sentosa keseluruhannya 3.816 KK dan Jorong makmur keseluruhannya berjumlah 2.892 KK. Nagari Padang Gelugur merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, yang mempunyai 2 Jorong yaitu Jorong Sentosa yang jumlah mempunyai 16 kampung dan Jorong Makmur mempunyai 20 kampung jadi total kampung yang ada di Nagari Padang Gelugur ini berjumlah 36 kampung.

Nagari Padang Gelugur ini terletak di wilayah dataran rendah dengan kondisi tanah yang subur serta didukung oleh sitem pengairan yang memadai. Nagari Padang Gelugur ini diapit oleh 2 (dua) Jorong yaitu Jorong Sentosa dan Jorong Makmur. Wilayah ini didominasi aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Secara Geografis wilayah Nagari Padang Gelugur berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

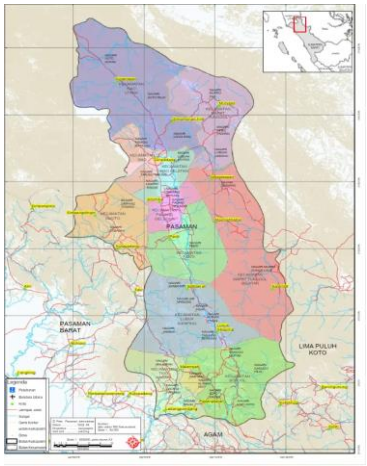
a. Sebelah Utara : Nagari Persiapan Sitombol.
b. Sebelah Timur : Nagari Persiapan Panti Timur.
c. Sebelah Selatan : Nagari Persiapan Sontang dan Bahagia.
d. Sebelah Barat : Nagari Cubadak/Kec.Dua koto[47].

[47] Buku Profil Nagari Padang Gelugur 2024

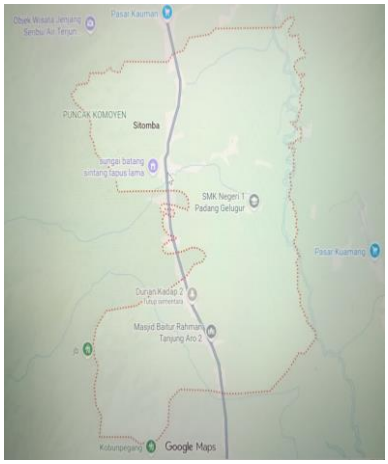
2. Peta dan Struktur kepengurusan Kantor Wali Nagari Padang Gelugur

Peta Kabupaten Pasaman, Kecamaatan Padang Gelugur, Nagari Padang Gelugur

Gambar 4.1



Gambar 4.2



Sumber: Kantor Wali nagari Padang Gelugur, 2026

Berikut adalah Gambar Sruktur Pemerintahan Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

Gambar 4.3



Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Gelugur 2026

Struktur Kepengurusan tersebut dipimpin oleh Kepala Wali Nagari sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari dan bertanggungjawab sesuai dengan kententuan perundang-undangan. Di bawahnya terdapat Sekretaris Nagari bertugas untuk membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu wali nagari dalam bidang pemerintahan umum dan administrasi kependudukan. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Wali Nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Umum Tata Usaha dan Umum bertugas untuk membantu Sekretaris Nagari dalam bidang tata usaha dan administrasi umum. Kepala Urusan Perencanaan bertugas untuk membantu Sekretaris nagari dalam bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran. Kepala Jorong Sentosa mempunyai tugas untuk membantu Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jorong Sentosa, menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan Nagari. Kepala Jorong Makmur mempunyai tugas untuk membantu Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Jorong Makmur serta menjadi penghubung anatara masyarakat dan Pemerintahan Nagari dalam menyampaikan aspirasi masyarakatnya.

Adapun Visi dan Misi Wali Nagari Padang gelugur ini sebagai berikut: Visinya iyalah “Terwujudnya Masyarakat Nagari Padang Gelugur yang Maju dan Berkeadilan”.

Misinya iyalah “Meningkatkan kualitas kehidupan Beragama dan Berkualitas Sumber daya Manusia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Menyelenggaran Tata pemerintahan Nagari dalam meningkatkan pelayanan umum terhadap masyarakat dengan memanfaatkan SDM melalui Aparatur Pemerintah Nagari, Menciptakan kesejahteraan masyarakat berbasiskan ekonomi kerakyatan, dan yang terakhir Meningkatkan keharmonisan dalam tata kehidupan sosial budaya masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebersamaan”.

3. Jumlah Data Penduduk berdasarkan Jorong di Nagari Padang Gelugur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Berikut adalah jumlah data penduduk dibagi berdasarkan jorong yang ada di Nagari Padang Gelugur sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Jorong

No	Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki Laki	Perempuan	
1	Sentosa	4.550 Orang	4.560 Orang	9.110 Orang
2	Makmur	3.797 Orang	3.709 Orang	7.506 Orang

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Gelugur 2026

Data di atas dapat menunjukkan jumlah penduduk di Nagari Padang Gelugur, yang mana data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Jorong Sentosa sebanyak 4.550 orang, kemudian jumlah perempuan 4.560 orang, dan jumlah penduduk yang ada di Jorong Makmur yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 3.797 orang dan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 3.709 orang.

4. Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Nagari Padang Gelugur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berikut adalah jumlah data penduduk dibagi berdasarkan pekerjaan yang ada di Nagari Padang Gelugur sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	234 Orang
2	TNI/Polri	15 Orang
3	Wiraswasta/Pedagang	1.672 Orang
4	Petani	2.716 Orang
5	Tukang	-
6	Buruh Tani	127 Orang
7	Pensiunan	32 Orang
8	Nelayan	0 Orang
9	Peternak	0 Orang
10	Jasa	4 Orang
11	Pengrajin	8 Orang

Sumber: Kantor Wali Nagari Nagari Padang Gelugur 2026

Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan data Pemerintah Nagari Padang Gelugur, jenis pekerjaan masyarakat cukup beragam, meliputi petani, wiraswasta/pedagang, karyawan, buruh tani, TNI/Polri, pensiunan, jasa, dan pengrajin.

5. Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Nagari Padang Gelugur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Berikut adalah jumlah data penduduk dibagi berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Nagari Padang Gelugur sebagai berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat pendidikan Masyarakat	Jumlah/Orang
1	TK	443 Orang
2	SD	2.014 Orang
3	SMP/Sederajat	1.747 Orang
4	SMA/Sederajat	2.460 Orang
5	Akademi/D1-D3	251 Orang
6	Sarjana	457 Orang

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Gelugur2026

Berdasarkan data tingkat pendidikan masyarakat Nagari Padang Gelugur, diketahui bahwa masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang sedang atau telah menempuh pendidikan TK sebanyak 443 orang. Selanjutnya, masyarakat dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 2.014 orang, sedangkan masyarakat dengan tingkat pendidikan SMP/sederajat berjumlah 1.747 orang. Selanjutnya masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA/ Sederajat berjumlah 2.460, selanjutnya masyarakat

dengan tingkat pendidikan Akademi/D1-D3 berjumlah 251 orang dan yang terakhir masyarakat dengan tingkat pendidikan Sarjana yang berjumlah 457 Orang.

6. Sarana atau Fasilitas Nagari Padang Gelugur

Sarana yang ada di jorong Sumba yang dipergunakan oleh masyarakat saat ini sangat terbatas. Adapun Fasilitas atau sarana yang dimiliki sebagai berikut:

a. Sarana Ibadah terdiri dari mesjid yang berjumlah 40 unit, mushala 8 unit . Jadi jumlah sarana ibadah sebanyak 48 unit.
b. Sarana Umum terdiri dari olahraga 1 Buah, kesenian atau Budaya 1 Buah, Balai Pertemuan 1 Buah, dan Pasar Nagari 1 Buah. Jadi jumlah sarana Umum sebanyak 4 Buah.
c. Sarana Kesehatan terdiri dari Puskesmas 1 unit, Poskesdes 1 unit, Posyandu 14 unit, Polindes 7 unit. Jadi jumlah sarana kesehatan sebanyak 23 unit.
d. Sarana Pendidikan terdiri dari Perpustakaan Nagari 1, Paud 7 Buah, TK 1 Buah, TPA 72 Buah, SD 11 Buah, SMP/Sederajat 3 Buah, SMA/Sederajat 3 Buah. Jadi jumlah sarana pendidikan sebanyak 98 buah.
e. Sarana kelembagaan terdiri dari LPMN 1 lembaga, Lembaga Adat 1 Lembaga, TP PKK 3 Lembaga, BUMNAG 1 Lembaga, Karang Taruna 3 Lembaga, dan Lembaga Kesenian 4 Lembaga. Jadi jumlah sarana Kelembagaan sebanyak 13 Lembaga.

7. Kondisi Sosial Nagari Padang Gelugur

Kondisi sosial di Nagari Padang Gelugur ini masih hidup dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang sederhana dan saling bergantung. Hubungan yang terjalin dengan baik antara warga didasarkan pada rasa kekeluargaan, kebersamaan,

dan saling menghormati. Dalam kehidupan Sehari-hari, masyarakat mempertahankan prinsip Gotong royong dalam kegiatan sosial, pertanian dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Untuk sosial budaya Nagari Padang Gelugur dapat dilihat dari kegiatan masyarakat yang dilakukan di Nagari ini, yaitu salah satunya adalah kegiatan oleh sekelompok wanita yaitu acara yassinan yang diadakan satu kali seminggu. Yassinan tersebut memiliki beberapa kegiatan seperti iyuran arisan, iyuran untuk acara pesta, iyuran simpan pinjam, dimana untuk kegiatan yassinan tersebut dilakukan oleh setiap kelompok wanita disetiap Jorong yang ada di Nagari Padang Gelugur.

Struktur sosial masyarakat di Nagari Padang Gelugur ini masih dipengaruhi oleh tokoh adat, tokoh agama dan aparatur jorong. Tokoh-tokoh ini sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah dan menjadi panutan bagi masyarakat. Misalnya seandainya ada permasalahan yang terjadi di masyarakat tokoh-tokoh itulah yang menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dilakukannya musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Aktivitas ekonomi yang ada di Nagari ini seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan[48].

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur

Pengelolaan Dana Desa sama artinya dengan mengelola APBDesa yang selama pengelolaannya semua proses harus dijalankan melalui

[48] Buku Profil Kantor Wali Nagari Padang Gelugur 2024

musyawarah Desa. Mulai dari pencarian potensi dan kebutuhan desa, perencanaan APBDes (dimana dana desa termasuk di dalamnya), perencanaan, pelaksanaan, Tranparansi, Akuntabilitas, Keadilan[49]. Hasil penelitian tersebut akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam merencanakan proses penyusunan program dan kegiatan, tidak terlepas dari tahap perencanaan kemudian diwujudkan melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari). Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial selaku Kepala Wali Nagari Padang Gelugur mengenai Pelolaan Dana Desa Berdasarkan proses perencanaan:

"*Ooo, kita dalam program pembangunan dinagari sebelum kita menetapkan titik-titik pembangunan, kita ada langkah-langkahnya seperti melalui musrembang atau rapat nagari dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan untuk menjalankan apa-apa yang akan kita bangun untuk tahun kedepan*"[50].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai Pelolaan Dana Desa Berdasarkan proses perencanaan menjelaskan bahwa :

"*Untuk proses perencanaan khusnya semua anggaran yang masuk ke nagari itu melalui penggalian gagasan oleh kepala jorong kekampung-*

[49] Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1

[50] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

kampung, kemudian dilaksanakannya musrembang yang dilaksanakan pada akhir tahun untuk penyusunan anggaran tahun selanjutnya"[51].

Sementara itu menurut Bapak Usman selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur menyatakan bahwa:

"*Ya, menyuarakan aspirasi masyarakatlah terutama masyarakat yang ada dikampung kita kan, disampaikan kepada nagari kalau baik itu dalam pembangunan ataupun melalui kegiatan-kegiatan lainnya seperti perkebunan, pertanian dan banyak hal lah yang kita suarakan kepada nagari agar dapat dibantu seperti membantu bibit, itu yang kita suarakan, kalau peternakan seperti kambing kalau bisa dibantu Nagari*"[52].

Kemudian menurut Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur Mengenai Proses perencanaan Pengelolaan Dana Desa Menjelaskan bahwa:

"*Prosesnya perencanaan itu dilaksanakan melalui musyawarah berdasarkan dari nagari, kepala jorong, masyarakat biasa dan ketua kampung beserta niniak mamak*"[53].

Dan menurut ibuk ibuk masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur Mengenai Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Menjelaskan bahwa:

"*Prosesnya mungkin ada beberapa kali melakukan rapat dengan ketua kampung ninik mamak untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setau saya seperti itu*"[54].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Proses perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbang Nagari yang melibatkan

[51] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[52] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[53] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[54] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

Pemerintah Nagari, Kepala Jorong, Niniak Mamak, Ketua Kampung, dan Masyarakat. Perencanaan diawali dengan penggalian aspirasi serta kebutuhan masyarakat, kemudian ditetapkan menjadi program prioritas sesuai kebutuhan Nagari. Aspirasi yang disampaikan mencakup pembangunan fisik maupun pemberdayaan di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dengan demikian, proses perencanaan telah menerapkan prinsip musyawarah dan partisipasi masyarakat, meskipun pemahaman sebagian masyarakat terhadap tahapan perencanaan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial selaku Kepala Wali Nagari mengenai Penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari menjelaskan bahwa:

"*Ooo, pengelolanya tetap dari hasil musyawarah diuatamakan dan disesuaikan dengan anggaran yang ada, dan kita buat semacam pemerataan pada tahun 2024 ada 8 titik, karena kita ada 2 jorong kita bagi 4 titik dalam 1 jorong"*[55].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai RKP Nagari dan APB Nagari menjelaskan bahwa:

"*Penyusunan dokumen itu dimulai dari pembentukan tim penyusun RKP Nagari yang namanya dan di sahkan oleh nagari kemudian disusun berdasarkan hasil musrembang berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh masyarakat kita*"[56].

[55] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[56] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

Sementara itu menurut Bapak Usman selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari menyatakan bahwa:

"*Penyusunan ini biasanya dibentuk oleh tim penyusun RKP nagari dan kemudian disusun berdasarkan hasil musrembang dan ditentukan oleh masyarakat berdasarkan prioritas yang dibutuhkan*"[57].

Kemudian menurut Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur Mengenai RKP Nagari dan APB Nagari menjelaskan bahwa:

"*Kalau saya sebagai masyarakat biasa kurang paham ya, kalau perencanaan RKP itu tentu pihak Nagari yang lebih tau*"[58].

Dan menurut ibuk masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur Mengenai RKP Nagari dan APB Nagari menjelaskan bahwa:

"*Kalau saya sebagai masyarakat biasa kurang paham ya, mungkin pihak Nagari yang lebih paham mengenai RKP tersebut*"[59].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari di Nagari Padang Gelugur dilakukan melalui proses perencanaan partisipatif yang berpedoman pada hasil Musrenbang Nagari. Program dan kegiatan yang disusun didasarkan pada kebutuhan serta prioritas masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Pemerintah nagari juga menerapkan pemerataan pembangunan antarjorong dalam pelaksanaan program. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami

[57] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[58] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[59] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

proses penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyampaian informasi oleh pemerintah Nagari.

b. Pelaksanaan

Dalam konteks Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari tahap pelaksanaan dalam menjalankan kegiatan dan program dan apa saja kendala yang dihadapi dalam tahap pelaksanaan dan bagaimana cara mengatasinya. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial selaku Kepala Wali Nagari Mengenai mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa menyampaikan bahwasanya:

"*Disamping program pembangunan itu, contohnya dalam usaha tani untuk mempermudah akses masyarakat dalam membawa hasil panennya, kemudian jalan lingkung, jalan lingkung itu akses-akses untuk menghubungkan antar kampung dan juga antar nagari dan juga pembangunan sarana-sarana umum seperti MCK kemudian sarana ibadah dan juga jaln menuju akses pendidikan*"[60].

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Rahmad selaku Sekretaris Nagari mengenai Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan oleh KASI atau kepala seksi yang ada di stuktur pemerintahan nagari bersama lembaga yang ada di nagari dan masyarakat setempat yang ada dilokasi kegiatan*"[61].

[60] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[61] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur Mengenai Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Kalau masyarakat seperti saya sendiri yang kita butuhkan dalam program nagari itu dapat menjangkau usaha-usaha masyarakat seperti jalan menuju akses pertanian, perkebunan terkadang nanti ada kampung-kampung itu yang gak ada MCK nya, kita mohonkan kepada pihak nagari supaya dibantu*"[62].

Berdasarkan hasil wawancara menurut Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur Mengenai Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di nagari ini menurut saya sudah terlaksana*"[63].

Dan menurut ibuk masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur Mengenai Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Itu biasanya dalam rapat akan disusun bersama dengan lembaga-lembaga nagari serta mengikutsertakan niniak mamak, pemuka adat dan ketua kampung yang ada di Nagari*"[64].

Berdasarkan hasil wawacara dengan informan bahwasanya: Mekanisme pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pembangunan sarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti jalan usaha tani, fasilitas umum,

---

[62] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[63] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[64] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

dan MCK. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perangkat nagari dengan melibatkan lembaga nagari serta berbagai unsur masyarakat, seperti niniak mamak, pemuka adat, dan ketua kampung. Masyarakat menilai bahwa program yang dilaksanakan telah memberikan manfaat, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti permasalahan lahan yang menyebabkan sebagian kegiatan mengalami penundaan. Dengan demikian, pelaksanaan Dana Desa telah berjalan cukup baik dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial selaku Kepala Wali Nagari Mengenai kendala yang dihadapi dalam tahap pelaksanaan menjelaskan bahwa:

"*Kendala tetap ada, karena pada umumnya masyarakat kita menginginkan pembangunan ini, kendala tetap ada terutama dari segi pembebasan lahan tapi kita di nagari tetap menanamkan prinsip "kalau tidak ada pembebasan lahan atau sengketa kita tidak akan membangun dalam tempat itu*"[65].

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari Mengenai kendala yang dihadapi dalam tahap pelaksanaan menjelaskan bahwa:

"*Alhamdulillah belum ada*"[66].

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur Mengenai kendala yang dihadapi dalam tahap pelaksanaan menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai kendala mungkin kadang-kadang mengenai pemabangunan jalan misalnya baik itu jalan usaha tani atau perkebunan, terkadang kita sudah meminta izin kepada pihak yang bersangkutan untuk dipakai sebagaian tanahnya untuk pembangunan jalan, dah sudah di*

[65] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[66] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

diskusikan dan orang yg punya tanah ini juga sudah setuju, pas peninjauan ke lapangan ternyata ukurannya berbeda dengan waktu survei pertama otomatis pembangunannya di hentikan untuk sementara waktu"[67].

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur Mengenai kendala yang dihadapi dalam tahap pelaksanaan menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai kendala sebagai masyarakat kadang cuaca, kalau mengenai pembangunan saya rasa sebagai masyarakat biasa sudah merata seperti pembangunan jalan ke gang-gang, bantuan dana desa sudah merasa dan merata*"[68].

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur Mengenai kendala yang dihadapi dalam tahap pelaksanaan menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai kendala Sejauh ini belum ada ya setau saya tapi gak tau juga*"[69].

Berdasarkan hasil wawacara dengan informan bahwasanya: Kendala dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur relatif tidak terlalu signifikan. Kendala yang paling sering dihadapi berkaitan dengan permasalahan lahan, seperti pembebasan lahan dan perbedaan ukuran tanah saat pelaksanaan pembangunan yang dapat menyebabkan kegiatan tertunda sementara. Selain itu, faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, secara umum pelaksanaan program dinilai telah berjalan dengan baik dan manfaat pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat secara merata.

[67] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[68] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[69] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

c. Tranparansi

Dalam konteks Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari tahap Transparansi. Seperti keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait program dan pengelolaan anggaran keuangan Nagari. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai upaya pemerintah dalam memberikan informasi menjelaskan bahwasanya:

"*kalau mengenai transparansi ini , pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan itu dengan menempelkan spanduk-spanduk di lokasi kegiatan*"[70].

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai upaya pemerintah dalam memberikan informasi yang menjelaskan bahwa:

"*Ooo kalau transparansi pelaksanaan kegiatan itu kita menempelkan spanduk-spanduk dilokasi kegiatan, mengisi terkait berapa jumlah dana, berapa jumlah pekerja dan berapa panjang kegiatan atau lokasi yang dilaksanakan*"[71].

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai upaya pemerintah dalam memberikan informasi menjelaskan bahwa:

"*Saya sempat bertanya kepada salah satu karyawan yang bekerja di kantor wali nagari ini mengenai akses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan nagari, karyawan ini menjawab ''Informasi kita terbuka pak, seperti melalui spanduk yang ditempelkan*

[70] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[71]Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

ditempat-tempat umum dan bila perlu secara langsung datang ke kantor pun kita terbuka dalam akuntabel dan transparansi dalam pelaksanakan kegiatan kita"[72].

Selanjutnya pernyataan dari Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai upaya pemerintah dalam memberikan informasi menjelaskan bahwa:

"*Seperti yang saya lihat pihak Nagari ada menempelkan spanduk di kegiatan atau di acara tertentu*"[73].

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai upaya pemerintah dalam memberikan informasi menjelaskan bahwa:

"*Bisa dilihat mungkin sudah adanya papan pengumuman atau pemberitahuan dari pemerintah nagari seperti apa-apa saja pembangunan yang dilakukan*"[74].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Pemerintah Nagari Padang Gelugur telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan menyediakan informasi kepada masyarakat melalui spanduk, baliho, dan papan informasi yang memuat kegiatan serta penggunaan anggaran. Selain itu, pemerintah nagari juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung di Kantor Nagari. Upaya tersebut menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi sehingga masyarakat

[72] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[73] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[74] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

dapat mengetahui program pembangunan dan penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan di nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai sejauh mana masyarakat diberi akses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Nagari menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai akses informasi mengenai pelaksanaannya bisamelihat dari spanduk yang ditempelken dibeberapa titik atau dibeberapa kampung dan kalau ingin lebih jelasnya sebernarnya masyarakat diperbolehkan datang ke kantor nagari ini*"[75].

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai sejauh mana masyarakat diberi akses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Nagari menjelaskan bahwa:

"*Informasi kita terbuka, seperti yang saya sampaikan tadi ada yang melalui spanduk dan ditempelkan ditempat-tempat umum dan bila perlu secara langsung datang ke Pemerintah Nagari ke kantor pun kita terbuka untuk akuntabel dan transparansi dalam pelaksanakan kegiatan kita*"[76].

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana masyarakat diberi akses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Nagari menjelaskan bahwa:

"*Saya sempat bertanya kepada salah satu karyawan yang bekerja di kantor wali nagari ini mengenai akses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan nagari, karyawan ini menjawab "Informasi kita terbuka pak, seperti melalui spanduk yang ditempelkan ditempat-tempat umum dan bila perlu secara langsung datang ke kantor pun*

[75] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[76] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

kita terbuka dalam akuntabel dan transparansi dalam pelaksanakan kegiatan kita"[77].

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana masyarakat diberi akses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Nagari menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai akses informasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan nagari bisa dilihat melalui spanduk yang ditempelkan ditempat-tempat umum*"[78].

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana masyarakat diberi akses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Nagari menjelaskan bahwa:

"*Bisa dilihat melalui spanduk yang ditempelkan ditempat-tempat umum*"[79].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Masyarakat Nagari Padang Gelugur telah diberikan akses informasi yang cukup terbuka mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan nagari. Informasi tersebut disampaikan melalui spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum serta dapat diperoleh secara langsung dengan datang ke kantor nagari. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah nagari dalam

[77] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[78] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[79] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

d. Akuntabilitas

Selanjutnya dalam Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari tahap Akuntabilitas. Seperti bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau nagari dalam mengelola dana yang bersumber dari pemerintah, kemudian diwujudkan melalui penyusunan laporan yang bersifat akuntabel. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program menjelaskan bahwa:

"*Pertanggungjawaban pemerintah nagari dalam menjalankan program tersebut dengan menyalurkan dana sesuai jumlah dan penngalokasian bidangnya, seperti BLT, BLT ini dana yang telah di tetapkan oleh pemerintah tidak boleh di tambah ataupun dikurang-kurangi, berapa jumlah yg tertera segitulah yang kita salurkan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut*"[80].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai bentuk pertanggungjawaban pemerintah nagari melaksanakan program daan penggunaan anggran tersebut dengan menyalurkan dana sesuai jumlah dan pengalokasian sesuai bidang-bidang yang ada di program itu*"[81].

[80] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[81] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program menyatakan bahwa:

"*Pemerintah nagari melaksanakan tanggungjawab atas pelaksanaan program dan penggunaan anggran melalui adanya laporan realisasi kegiatan dan laporan keuangan kemudian disampaikan kepada pemerintah kecamatan, kabupaten serta phak yang terkait dengan ketentuan yang berlaku*"[82].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program menjelaskan bahwa:

"*Melalui adanya laporan realisasi kegiatan dan laporan keuangan kemudian disampaikan kepada pemerintah kecamatan, kabupaten serta pihak yang terkait dengan ketentuan yang berlaku*"[83].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program menjelaskan bahwa:

"*Melalui adanya laporan realisasi kegiatan dan laporan keuangan kemudian disampaikan kepada pemerintah kecamatan, kabupaten serta pihak yang terkait dengan ketentuan yang berlaku*"[84].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program di Nagari Padang Gelugur dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Nagari. Setiap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan disertai dengan laporan realisasi serta laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemerintah kecamatan,

[82] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[83] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[84] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

kabupaten, dan pihak terkait lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui pelaporan yang rutin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai mekanisme pelaporan dan evaluasi menjelaskan bahwa:

"*Iya, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan wajib dibuatkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian jika sudah selesai laporan itu maka akan disampaikan kepada pemerintah kecamatan, kabupaten dan pihak lainnya, guna evaluasi ini untuk melihat sejauh mana program yang telah dijalalankan atau dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang direncanakan itulah guna pelaporan dan evaluasi*"[85].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai mekanisme pelaporan dan evaluasi menjelaskan bahwa:

"*Mekanisme pelaporan dan evalusi sangat perlu untuk mengetahui setiap kegiatan yang telah dilaksankan dengan membuatkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang ada*"[86].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai mekanisme pelaporan dan evaluasi menjelaskan bahwa:

"*Iya ada mekanisme pelaporan ini dilakukan secara rutin sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan kegiatan nagari*"[87].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai mekanisme pelaporan dan evaluasi menjelaskan bahwa:

"*Iya ada mekanisme pelaporan mengenai pengelolaan kegiatan nagari*"[88].

---

[85] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[86] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[87] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[88] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai mekanisme pelaporan dan evaluasi menjelaskan bahwa:

"*Iya ada*"[89].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Mekanisme pelaporan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan Nagari Padang Gelugur telah dilaksanakan secara rutin melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan dan evaluasi tersebut menjadi sarana untuk menilai keberhasilan program sekaligus mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan Kegiatan dan Keuangan Nagari.

e. Keadilan

Dalam Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari tahap Keadilan untuk menekankan perlakuan yang sama, seimbang, sesuai hak kewajiban dan kebutuhan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Syafrial selaku Kepala Wali Nagari mengenai pelaksanaan program dan kebijakan menjelaskan bahwa:

"*Pemerintah nagari memastikan program apa saja yang dibutuhkan masyarakat melalui musyawarah nagari yang dilaksanakan dari musyawarah inilah kita dapat mengetahui program yang akan dijalankan sehingga bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah juga berupaya menjanhkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat termasuk kelompok kurang mampu, sehingga semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya*"[90].

[89] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

[90] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Selaku Sekretaris Nagari mengenai pelaksanaan program dan kebijakan menjelaskan bahwa:

"*Ooo untuk keadilan terkait pelaksanaan ataupun manfaat contohnya, terkhusus dana desa itu ada bantuan lansung tunai (BLT) itu kita ambil dari seluruh kampung untuk menerima bantuan langsung tunai tersebut berdasarkan penilaian dari ketua kampung atapun niniak mamak setempat*"[91].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai pelaksanaan program dan kebijakan menjelaskan bahwa:

"*Pemerintah nagari melaksanakan tanggungjawab atas pelaksanaan program dan penggunaan anggran melalui adanya laporan realisasi kegiatan dan laporan keuangan kemudian disampaikan kepada pemerintah kecamatan, kabupaten serta pihak yang terkait dengan ketentuan yang berlaku*"[92].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai pelaksanaan program dan kebijakan menjelaskan bahwa:

"*Sejauh ini yang saya taukan kalau soal dana desa itu sudah ada pemerataan dan dilaksanakan musyawarah bagaimana pelaksanaan ini berjalan dengan lancar dengan di tunjuknya ketua kampung atau niniak mamak yang memilih dengan kriteria-kriteria tertentu*"[93].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai pelaksanaan program dan kebijakan menjelaskan bahwa:

---

[91] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[92] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[93] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

"*Sejauh ini sudah soalnya pembangunan ini kan merata*"[94].

Berdasarkan hasil wawancara kelima informan dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam Pengelolaan Dana Desa telah diterapkan melalui penentuan progaram berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas sehingga manfaat pembangunan masyarat secara lebih merata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai Sejauh mana prinsip keadilan menjadi pertimbangan dalam penetapan prioritas program menjelaskan bahwa:

"*Dalam prinsip keadilan ini harus mempertimbangkan pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dankepentinngan masyarakat, sehingga program yang dilaksanakan tidak sia-sia dan tidak hanya berfokus pada wilayah atau kelompok tertentu*"[95].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Sekretaris Nagari mengenai Sejauh mana prinsip keadilan menjadi pertimbangan dalam penetapan prioritas program menjelaskan bahwa:

"*Sudah jelas pasti ada pertimbangan, karena kita ada 2 jorong otomatis dalam mengambil kebijakan untuk penetapan ataupun prioritas program itu kita bagi rata kalau seandainya ada ada kegiatan tersebut 4 bidang itu kita bagi 2, 2/jorong*"[96].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana prinsip keadilan menjadi pertimbangan dalam penetapan prioritas program menjelaskan bahwa:

---

[94] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

[95] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[96] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

"*Ya alhamdulillah seperti jalan kerumah saya itu sudah di bangun oleh pihak nagari, semua kampung saya lihat sudah banyak yg dibangun dan juga sudah merasakan manfaatnya*"[97].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana prinsip keadilan menjadi pertimbangan dalam penetapan prioritas program menjelaskan bahwa:

"*Menurut saya sudah merata seperti adanya pembangunan jalan kee gang-gang, adanya bantuan dana desa seperti dana desa dll*"[98].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana prinsip keadilan menjadi pertimbangan dalam penetapan prioritas program menjelaskan bahwa:

"*Menurut saya sudah merata seperti adanya pembangunan jalan ke usaha tani baik itu jalan kesawah dan jalan kekebun melalui anggaran dana desa*"[99].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Prinsip keadilan telah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penetapan prioritas program di Nagari Padang Gelugur. Pemerintah nagari berupaya mengalokasikan anggaran secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membagi pelaksanaan program secara proporsional di setiap jorong. Masyarakat juga menilai bahwa pembangunan dan bantuan yang bersumber dari Dana Desa telah dirasakan secara cukup merata, baik melalui pembangunan jalan lingkungan, jalan usaha tani, maupun program lainnya.

[97] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[98] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[99] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam penetapan prioritas program telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah nagari.

2. Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Pengelolaan Dana Desa adalah mengelola APBDesa secara baik dan transparan maupun akuntabel tetapi perlu memperhatikan nilai-nilai Ekonomi Islam seperti Amanah, Keadilan, Tauhid, Maslahah, Khalifah (Manusia) dalam setiap proses Pengelolaannya. Hasil penelitian tersebut akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Amanah

Dalam Pengelolaan Dana Desa di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam bahwasanya salah satu indikatornya iyalah Amanah. Seperti menerapkan prinsip amanah dalam Pengelolaan Dana Desa seperti mencerminkan Nilai kejujuran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Wali Nagari mengenai prinsip amanah dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

> "*Yang jelasnya kalau mengenai prinsip amanah yang telah dicantumkan dalam permendes dan juga peraturan bupati, kita tetap melaksanakannya seperti hak-hak yang masyarakat tetap kita salurkan*"[100].

[100] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai prinsip amanah dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Prinsip amanah sudah diterapkan seperti dengan amanah dalam penyaluran anggaran, amanah dalam pekerjaan seperti melayani masyarakat*"[101].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai prinsip amanah dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Seperti yang saya lihat prinsip amanah ini sudah terlaksana seperti amanah dalam menjalani tugas-tugas dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat menurut saya itu sudah amanah*"[102].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai prinsip amanah dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Seperti yang saya lihat prinsip amanah ini sudah terlaksana seperti amanah dalam melayani masyarakat dalam pembuatan surat-surat, penyaluran bantuan kepada masyarakat menurut saya itu sudah amanah*"[103].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai prinsip amanah dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

---

[101] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[102] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[103] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

"*Prinsip amanah ini sudah terlaksana seperti amanah dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat menurut saya itu sudah amanah*"[104].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Prinsip amanah telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa melalui penggunaan anggaran sesuai ketentuan, pelaksanaan program sesuai rencana, serta adanya laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai Sejauh mana Pengeloaan Dana Desa mencerminkan nilai kejujuran dan tanggungjawab menjelaskan bahwa:

"*Ooo kalau mengenai cerminan kejujuran dan tanggungjawab mungkin salah satunya iyalah dalam penyampaian informasi mengenai penggunaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui musyawarah nagari, ataupun di papan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan*"[105].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai Sejauh mana Pengeloaan Dana Desa mencerminkan nilai kejujuran dan tanggungjawab menjelaskan bahwa:

"*Prinsip amanah yang kita terapkan itu yang pertama kepada kepala jorong, pemuda, niniak mamak dan ketua kampung terkait untuk penujukan penerima BLT itu kita amanahkan kepada ketua kampung untuk lebih tepatnya dan niniak mamak yang ada dikampung-kampung dan berdasarkan penilaian merekalah apa itu yang pas untuk penerima BLT tersebut*"[106].

---

[104] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

[105] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[106] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana Pengeloaan Dana Desa mencerminkan nilai kejujuran dan tanggungjawab menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai sejauh mananya kita bisa lihat dari kinerja yang dilakukan aparatur nagari mulai dengan melaksanakan pekerjaan yang telah diamanatkan kepada pihak yang bersangkutan sperti menyalurkan bantuan dengan baik itu merupakan sifat yang mencerminkan kejujuran dan tanggungjawab menurut saya begitu*"[107].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana Pengeloaan Dana Desa mencerminkan nilai kejujuran dan tanggungjawab menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai sejauh mananya menurut saya sudah memiliki sifat kejujuran dan tanggungjawab seperti yang saya katakan tadi baik dalam segi menjalakankan tugas-tugas dalam melayani masyarakat dan menyalurkan bantuan sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan*"[108].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana Pengeloaan Dana Desa mencerminkan nilai kejujuran dan tanggungjawab menjelaskan bahwa:

"*Menurut saya sudah memiliki sifat kejujuran dan tanggungjawab seperti yang saya katakan tadi baik dalam segi menyalurkan bantuan sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan*"[109].

---

[107] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[108] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[109] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah mencerminkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Hal ini terlihat dari keterbukaan pemerintah nagari dalam menyampaikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat, pelaksanaan tugas yang sesuai dengan amanah yang diberikan, serta penyaluran bantuan yang dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Dengan demikian, prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Desa telah diterapkan melalui transparansi, tanggung jawab, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

b. Keadilan

Prinsip yang menekankan perlakuan yang sama, seimbang, sesuai hak kewajiban dan kebutuhan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai prinsip keadilan dalam proses Pengalokasian Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Prinsip keadilan dalam proses pengalokasian dana desa ini berdasarkan kebutuhan prioritas yang telah disepakati dalam musyawarah nagari, dengan adanya musyawarah tersebut pemerintah nagari mempertimbangkan berbagai aspek yang dibutuhkan masyarakat baik itu mengenai pembangunan jalan usaha tani itu semua harus dipertimbangkan guna semua masyarakat merasakan manfaatnya*"[110].

[110] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai prinsip keadilan dalam proses Pengalokasian Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Dalam proses pengalokasian dana desa kita sangat menerapkan sistem keadilan dalam penyaluran, penyalurannya pun harus sesuai aturan yang ada atau yang berlaku, kita juga tidak membeda-bedakan antara keluarga dekat maupun keluarga jauh, pokoknya kita lebih mengutamakan yang lebih membutuhkan*"[111].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai prinsip keadilan dalam proses Pengalokasian Dana Desa menyatakan bahwa:

"*Kalau mengenai keadilan ini menurut saya sudah ada diterapkan dalam proses pengalokasian dana desa ini, contohnya saja adil dalam penyaluran dana desa, jadi jumlah kampung yang ada di nagari ini setau saja ada 36 kampung jadi setiap kampung diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan dana desa ini biasanya bantuan ini disebut dengan bantuan BLT, menurut saya itu sudah adil*"[112].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai prinsip keadilan dalam proses Pengalokasian Dana Desa menyatakan bahwa:

"*Kalau mengenai keadilan ini menurut saya sudah ada diterapkan dalam proses pengalokasian dana desa ini, contohnya saja adil dalam penyaluran dana desa itu mungkin yang saya tau*"[113].

[111] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[112] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[113] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai prinsip keadilan dalam proses Pengalokasian Dana Desa menyatakan bahwa:

"*Menurut saya sudah ada diterapkan dalam proses pengalokasian dana desa ini*"[114].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Prinsip keadilan telah diterapkan dalam Pengelolaan Dana Desa melalui pemerataan pembangunan dan penentuan program berdasarkan kebutuhan masyarakat serta skala prioritas pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai Sejauh mana Dana Desa didistribusikan secara merata kepada masyarakat menyatakan bahwa:

"*Dana desa ini dasarnya tidak disistribusikan secara langsung dan merata, melainkan disalurkan sesuai dengan program dan kebutuhan yang telah ditetapkan supaya seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya*"[115].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai Sejauh mana Dana Desa didistribusikan secara merata kepada masyarakat menyatakan bahwa:

"*Kalau mengenai distribusi dana desa ini alhamdulillah sejauh ini baik dan berjalan dengan lancar, contohnya penyaluran dana BLT, pembangunan jalan usaha tani, dan tetap sesuai peraturan yang ada*"[116].

---

[114] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

[115] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[116] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana Dana Desa didistribusikan secara merata kepada masyarakat menyatakan bahwa:

"*Kalau mengenai pendistribusiannya seperti yang saya bilang tadi nagari membagi 2/kampung mengenai bantuan BLT ini, dengan melalui pendataan kepada masyarakat kemudian di musyawarahkan Kembali apakah yang dipilih tim pendata itu layak atau pantas untuk menerima bantuan tersebut*"[117].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana Dana Desa didistribusikan secara merata kepada masyarakat menyatakan bahwa:

"*Kalau mengenai pendistribusiannya seperti yang saya tau itu dibagi perkampung*"[118].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana Dana Desa didistribusikan secara merata kepada masyarakat menyatakan bahwa:

"*Kalau mengenai pendistribusiannya itu pihak nagari membaginya perkampung mengenai bantuan BLT ini dan di musyawahrakan kembali dengan jorong, niniak mamak, ketua kampung*"[119].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Distribusi Dana Desa di Nagari Padang Gelugur tidak dilakukan secara langsung dan sama rata kepada seluruh masyarakat, melainkan disesuaikan

[117] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[118] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[119] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

dengan program, kebutuhan, dan kriteria yang telah ditetapkan. Pendistribusian bantuan, seperti BLT, dilakukan melalui pendataan dan musyawarah yang melibatkan pemerintah nagari, jorong, niniak mamak, dan ketua kampung untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang berhak. Selain itu, Dana Desa juga dimanfaatkan untuk pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, sehingga prinsip keadilan dalam Pendistribusian Dana Desa dapat terlaksana dengan baik.

c. Tauhid

Dalam Pengelolaan Dana Desa di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam bahwasanya salah satu indikatornya iyalah Tauhid. Seperti nilai kejujuran dan tanggungjawab serta sejauh mana nilai tersebut menjadi landasan etis dalam pengambilan keputusan terkait Pengelolaan atau Penggunaan Dana Desa. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab menejelaskan bahwa:

> ”*Nilai-nilai tauhid khususnya kejujuran dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan masyarakat, selain itu dalam penggunaan anggran itu dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan guna menghindari penyalahgunaan dana*”[120].

[120]Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab menyampaikan bahwa:

"*Nilai-nilai tauhid sangat kita nomor satukan baik itu dalam sifat kejujuran maupun tanggungjawab, kita sebagai aparatur nagari sangat bertanggungjawab akan pengelolaan dana desa jika waktunya penyaluran dana desa maka akan dilaksanakan oleh tim yang bersangkutan sesuai bidangnya, dalam pengelolaan dana desa ini juga kami sangat menerapkan kejujuran seperti dalam penyaluran bantuan berapa jumlah yg dicairkan dari pemerintah segitu juga kami salurkan kepada masyarakat yang mendapat bantuan tersebut*"[121].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab menjelaskan bahwa:

"*Masyarakat juga berharap agar Pemerintah Nagari selalu menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam Mengelola Dana Desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat*"[122].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab menjelaskan bahwa:

"*Nilai-nilai tauhid seperti kejujuran dan tanggungjawab ini menurut saya sudah dilaksanakan seperti menjalankan tugas dengan baik melayani masyarakat dengan ramah tamah jujur dalam penyaluran bantuan*"[123].

[121] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[122] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[123] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab menjelaskan bahwa:

"*Nilai-nilai tauhid seperti kejujuran dan tanggungjawab ini menurut saya itu sudah dilaksanakan seperti menjalankan tugas, ramah dan tamah*"[124].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Prinsip tauhid tercermin dalam upaya pemerintah nagari untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai sejauh mana nilai pertanggungjawaban kepada allah swt menjadi landasan etis menjelaskan bahwa:

"*Menurut saya nilai pertanggungjawaban kepada Allah SWT menjadi salah satu landasan etis dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa, kemudian dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan sesuai aturan yang berlaku, mengutamakan kepentingan masyarakat itu sudah termasuk nilai pertanggungjawaban*"[125].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai sejauh mana nilai

[124] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

[125] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

pertanggungjawaban kepada allah swt menjadi landasan etis menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai nilai pertanggungjawaban kepada allah swt terkait penggunaan dana desa, kami mengedepankan nilai kejujuran, amanah guna mencapai manfaat yang akan dirasakan masyarakat tetapi harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku yang ada dinagari ini*"[126].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana nilai pertanggungjawaban kepada allah swt menjadi landasan etis menjelaskan bahwa:

"*Nilai pertanggungjawaban kepada Allah SWT Mengenai landasan etis ini aparatur nagari mengedepankan kejujuran dan amanah dalam setiap pekerjaan yang dilakukan guna memberikan manfaat kepada masyarakat dan harus sesuai dengan peraturan yang ada*"[127].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana nilai pertanggungjawaban kepada allah swt menjadi landasan etis menjelaskan bahwa:

"*Nilai pertanggungjawaban kepada allah swt mungkin salah satunya dengan mengedepankan kejujuran dan amanah dalam setiap pekerjaan yang dilakukan guna memberikan manfaat kepada masyarakat dan harus sesuai dengan peraturan yang ada*"[128].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana nilai

[126] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[127] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[128] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

pertanggungjawaban kepada allah swt menjadi landasan etis menjelaskan bahwa:

"*Mengedepankan kejujuran dan amanah dalam setiap pekerjaan yang dilakukan guna memberikan manfaat kepada masyarakat dan harus sesuai dengan peraturan yang ada*"[129].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Nilai pertanggungjawaban kepada Allah SWT menjadi landasan etis dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur. Hal ini tercermin dari upaya aparatur nagari untuk mengedepankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan serta pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa. Selain itu, penggunaan Dana Desa dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dengan demikian, nilai pertanggungjawaban kepada Allah SWT diwujudkan melalui pengelolaan Dana Desa yang jujur, amanah, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Maslahah

Dalam Pengelolaan Dana Desa di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam bahwasanya salah satu indikatornya iyalah Maslahah. Seperti membawa manfaat, kebaikan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

[129] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai Pengelolaan Dana Desa Dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan menjelaskan bahwa:

"*Alhamdulillah sudah banyak yang merasakan manfaatnya, contohnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), kita memfasilitiasi masyarakat itu kerena kita mempunyai kampung yang berjumlah 36 kita buat pembagian yang sistemnya dibagi perkampung kemudian disesuaikan karena di permenkeu karena sudah ditetapkan 15% dari dana desa itu untuk BLT yaitu dengan jumlah Rp.300.000/bulan yang diterima selama satu tahun, masing-masing kampung ada yang menerima 2 sampai 3 orang dalam satu kampung, dan kriterianya yang penerimanya ini tentunya orang yang berkebutuhan khusus, miskin desil rendah dan jugak orang yang berpenyakit menaun*"[130].

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai Pengelolaan Dana Desa Dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan menjelaskan bahwa:

"*Alhamdulillah manfaat dana desa ini sungguh bermanfaat bagi masyarakat kita kalau mengenai program BLT itu membantu ekonomi kemudian biaya berobat bagi lansia ataupun bagi penyakit menaun kalau dibidang pembangunan sudah meratanya pembangunan disetiap kampung baik itu di gang-gang kampung ataupun jalan usaha tani ataupun MCK yang ada dikampung-kampung itu alhamdulillah sudah bisa kita salurkan*"[131].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Pengelolaan Dana Desa Dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai manfaat dana desa, saya salah satunya yang merasakan manfaatnya iti salah satunya adanya pembangunan jalan dikampung-kampung atau kalau di desa ini disebut dengan gang-gang kecil untuk menghubungkan kampung-kampung yang ada di nagari ini*"[132].

---

[130] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[131] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[132] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Pengelolaan Dana Desa Dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai manfaat dana desa, seperti yang saya bilang tadi iyalah adanya pembangunan jalan pertanian, pembukaan jalan-jalan ke gang-gang, danya pembangunan MCK*"[133].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Pengelolaan Dana Desa Dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai manfaat dana desa, seperti yang saya bilang tadi iyalah adanya pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses jalan bagi masyarakat yang hendak pergi kesawah atau keladangnya dan ada juga bantuan BLT biasanya diambil perkampung dan ditentukan pas diadakannya rapat dengan ketua kampung dan niniak mamak*"[134].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Prinsip Maslahah telah diterapkan dalam Pengelolaan Dana Desa karena Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan masyarakat Nagari Padang Gelugur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai Sejauh mana progra yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menjelaskan bahwa:

"*Alhamdilllah masyarakat sangat terbantu dengan adanya program BLT ini*"[135].

---

[133] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[134] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

[135] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai Sejauh mana progra yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menjelaskan bahwa:

"*Seperti halnya yg saya jelaskan tadi pada program BLT ini sangat berguna bagi masyarakat seperti membantu masyarakat dalam berobat bagi lansia atau bagi masyarakat yang mempunyai penyakit menaun, dengan adanya bantuan ini masyarakat sangat tertolong*"[136].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana progra yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menjelaskan bahwa:

"*Program yang dijalankan sangat bermanfaat mungkin salah satu manfaatnya itu mempermudah akses jalan bagi masyarakat yang biasanya jalan bebatuan sekarang sudah jalan cor, itulah salah satu manfaatnya*"[137].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana progra yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menjelaskan bahwa:

"*Program yang dijalankan sangat bermanfaat mungkin salah satu manfaatnya mempermudah masyarakat dalam menggunakan air seperti MCK digunakan untuk tempat mandi, mencuci baju itulah salah satu manfaatnya*"[138].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana progra yang

[136] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib

[137] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[138] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menjelaskan bahwa:

"*Program yang dijalankan sangat bermanfaat mungkin salah satu manfaatnya itu mempermudah akses jalan bagi masyarakat yang akan melewati jalan tersebut*"[139].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya: Program-program yang didanai melalui Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut terlihat dari bantuan BLT yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya lansia dan masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas MCK yang memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, program yang dijalankan telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat Nagari Padang Gelugur.

e. Khalifah

Dalam Pengelolaan Dana Desa di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam bahwasanya salah satu indikatornya iyalah Khalifah atau manusia seperti bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM khusnya dalam Pengelolaan Dana Desa dan mengenai program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

[139] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam mendukung peningkatan SDM menjelaskan bahwa:

"*Dalam mendukung peningkatan SDM nagari ini menyelenggarakan semacam pelatihan sesuai dengan usulan masyarakat contohnya, pelatihan budidaya ikan, pelatihan mengenai pertanian dan ada juga pelatihan untukk mengurangi kenakalan remaja yang ada di nagari padang gelugur*"[140].

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam mendukung peningkatan SDM menjelaskan bahwa:

"*Dalam peningkatan sumber daya manusia itu sebenarnya ada pulak kegiatan berbentuk pelatihan sesuai dengan usulan masyarakat contohnya, pelatihan budidaya ikan banyak dimasyarakat kita ber usaha dibidang ternak ikan kemudian pelatihan tentang penyakit masyarakat untuk mengurangi kenakalan remaja yang ada di nagari padang gelugur*"[141].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam mendukung peningkatan SDM menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai peningkatan kualitas SDM ini saya pernah terlibat dalam pelatihan yang diadakan oleh pihak nagari mengenai pengelolaan dana desa ternyata ada pula kegiatannya yang berbentuk pelatihan sesuai perminntaan masyarakat, waktu saya mengikuti pelatihan ini, pelatihan ini membahas tentang pertanian berbasis teknologi*"[142].

[140] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[141] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[142] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam mendukung peningkatan SDM menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai peningkatan kualitas SDM ini saya pernah terlibat dalam pelatihan yang diadakan oleh pihak nagari mengenai pengelolaan dana desa ternyata ada pula kegiatannya yang berbentuk pelatihan sesuai perminntaan masyarakat, waktu saya mengikuti pelatihan ini, pelatihan ini membahas tentang pertanian berbasis teknologi*"[143].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam mendukung peningkatan SDM menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai peningkatan kualitas SDM ini saya pernah terlibat dalam pelatihan yang diadakan oleh pihak nagari mengenai pengelolaan dana desa ternyata ada pula kegiatannya yang berbentuk pelatihan sesuai permintaan masyarakat, waktu saya mengikuti pelatihan ini, pelatihan ini membahas tentang tata caara budidaya belut, pembuatan kue kering dan ada pelatihan wirausaha bagi anak muda*"[144].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut mencakup pelatihan pertanian berbasis teknologi, budidaya belut, pembuatan kue kering, dan kewirausahaan bagi pemuda. Dengan demikian, Dana Desa telah

[143] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[144] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai Sejauh mana program yang dilaksanakan mampu meningkaykan kesejahteraan masyarakat menjelaskan bahwa:

"*Dari program seperti pelatihan yang saya sebutkan tadi itu sangat banyak manfaat yang dirasakan masyarakat, apalagi kan masyarakat kita ini pendidikannya kebanyakan tamatan SD, masyarakat sangat-sangat bersyukur dengan adanya program ataupun pelatihan yang diselenggarakan nagari*"[145].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai Sejauh mana program yang dilaksanakan mampu meningkaykan kesejahteraan masyarakat menjelaskan bahwa:

"*Alhamdulillah sudah dilaksanakan setiap tahunnya kalau memang itu kita anggarkan untuk pelatihan-pelatihan kita tetap anggarkan ataupun dilaksanakan pada akhir tahun*"[146].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana program yang dilaksanakan mampu meningkaykan kesejahteraan masyarakat menjelaskan bahwa:

"*Mengenai sejauuh mana programnya itu sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti yang saya bilang tadi pembahasannya itukan membahas mengenai pertanian yang bebasis teknolgi, yang selama ini kalau mau panen padi masyarakat masih menggunakan alat memotong batang padi itu menggunakan alat tradisional yang nama alatnya ini biasa masyarakat bilang dengan sebutan sabit, dengan seiring berkembangnya teknologi ternyata ada mesin panen padi yang memudahkan masyarakat dalam memanen padinya itulah manfaat yang saya rasakan*"[147].

---

[145] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[146] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[147] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana program yang dilaksanakan mampu meningkaykan kesejahteraan masyarakat menjelaskan bahwa:

"*Mengenai sejauh mana programnya itu sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat guna menambah ilmu dibidang teknologi mungkin itu salah satunya*"[148].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana program yang dilaksanakan mampu meningkaykan kesejahteraan masyarakat menjelaskan bahwa:

"*Mengenai sejauh mana programnya itu sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti yang saya bilang tadi pembahasannya itukan membahas mengenai budidaya belut, pembuatan kue kering dan wirausaha bagi anak muda*"[149].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Program-program yang dilaksanakan melalui Dana Desa telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Padang Gelugur. Hal ini terlihat dari pelaksanaan berbagai pelatihan yang menambah pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian, budidaya, serta kewirausahaan. Program tersebut dinilai bermanfaat karena membantu masyarakat meningkatkan

[148] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[149] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

kemampuan dan membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan ekonomi mereka.

3. Faktor Penghambat yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Hambatan juga sering kali disebut dengan kendala atau faktor yang dapat menghambat proses seperti Sumber Daya Manusia yang masih kurang, kurangnya transparansi Pengelolaan Dana Desa, Adanya hambatan Teknis, Kurang maksimal dalam proses audit dan evaluasi dan yang terakhir Rendahnya pendidikan Masyarakat. Hasil penelitian tersebut akan diuraikan secara sitematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai beriku:

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Masih Kurang

Dalam Pengelolaan Dana Desa ada faktor penghambat yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa salah satu indikatornya iyalah Kompetensi SDM yang masih kurang. Seperti sejauh mana upaya yang dilakukkan pemerintah untuk peningkatan kapsitas SDM untuk mendukung Pengelolaan Dana Desa. Berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai Kemampuan Aparatur Nagari dalam Mengelola Dana Desa secara efektif menjelaskan bahwa:

"*Menurut saya kemampuan aparatur nagari dalam mengelola dana desa ini sudah baik terutama dalam melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini didukung juga dengan adanya pelatihan*

mengenai teknologi salah satunya guna mendapatkan informasi yang lebih efektif, efesien dan akuntabel"[150].

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai Kemampuan Aparatur Nagari dalam Mengelola Dana Desa secara efektif menjelaskan bahwa:

"*Sejauh ini kemampuan aparatur nagari sudah baik dalam mengelola dana desa, baik itu dalam pelaksanaan hingga pertanggungjawaban serta laporan disetiap kagiatannya dan berjalan sesuai aturan yang ada*"[151].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Kemampuan Aparatur Nagari dalam Mengelola Dana Desa secara efektif menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai kemampuan aparatur nagari dalam mengelola dana desa sudah efektif dan efesien dan juga sudah sesuai dengan peraturan permendagri dan peraturan bupati yang berlaku*"[152].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Kemampuan Aparatur Nagari dalam Mengelola Dana Desa secara efektif menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai kemampuan aparatur nagari dalam mengelola dana desa sudah efektif dan efesien dan juga sudah sesuai dengan peraturan nagari yang berlaku*"[153].

---

[150] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[151] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[152] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[153] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Kemampuan Aparatur Nagari dalam Mengelola Dana Desa secara efektif menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai kemampuan aparatur nagari dalam mengelola dana desa sudah sesuai dengan peraturan nagari yang berlaku*"[154].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Kompetensi sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam pengelolaan Dana Desa sehingga diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai sejauh mana upaya peningkatan SDM menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai upaya peningkatan kapasitas SDM ini telah dilakukan melalui berbagai kegiatan salah satunya pelatihan tadi ada juga sosialisasi yang baru-baru ini ada juga namanya informasi berbasis teknologi atau digital*"[155].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai sejauh mana upaya peningkatan SDM menjelaskan bahwa:

"*Upaya yang dilakukan nagari iyalah seperti mengadakan pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat dengan adanya pelatihan dan sosialisasi ini akan menambah pengetahuan bagi masyarakat yang kurang paham mengenai pengelolaan dana desa ini*"[156].

---

[154] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

[155] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[156] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana upaya peningkatan SDM menjelaskan bahwa:

"*Ooo mengenai upaya peningkatan kapasitas SDM ini seperti melalui pelatihan ataupun sosialisasi ke kampung-kampung yang ada di nagari ini itu sudah menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak nagari*"[157].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana upaya peningkatan SDM menjelaskan bahwa:

"*Ooo kalau mengenai upaya peningkatan kapasitas SDM ini seperti melalui pelatihan*"[158].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana upaya peningkatan SDM menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai upaya peningkatan kapasitas SDM ini seperti melalui pelatihan yang dilaksanakan setiap akhir tahun, dananya setau saya juga diambil dari dana desa*"[159].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Nagari Padang Gelugur telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman aparatur nagari serta masyarakat

[157] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[158] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[159] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

mengenai pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya upaya peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kurangnya Transparansi Pengelolaan Dana Desa.

Dalam Pengelolaan Dana Desa ada faktor penghambat yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa salah satu indikatornya iyalah KurangnyaTransparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Seperti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai prakti transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai praktik transparansi ini sudah kami laksanakan seperti menempelkan spantuk atau pemasangan baliho dipapan informasi anggaran, serta penyampaian laporan kegiatan kepada masyarakat guna memberitahu informasi terkait dana desa yang sedang dijalankan, mungkin salah satunya itu*"[160].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai praktik transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa menyampaikan bahwa:

"*Sejauh ini praktinya dilapangan iyalah seperti keterbukaan mengenai dana desa yang sudah dibuat dalam bentuk spanduk, pemasangan papan informasi mengenai anggaran*"[161].

[160] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[161] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai prakti transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Praktik transparansi sudah terlaksana seprti dengan memberi informasi di papan informasi baik itu informasi mengenai jumlah anggaran yang akan disalurkan semua sudah di tempelkan di papan informasi*"[162].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai prakti transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Praktik transparansi sudah terlaksana seperti dengan memberi informasi di papan informasi baik itu informasi mengenai jumlah anggaran yang akan disalurkan semua sudah di tempelkan di papan informasi*"[163].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai prakti transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Praktik transparansi sudah terlaksana seperti adanya spanduk yang di tempelkan setiap kegiatan yang dilaksanakan mengenai informasi dana desa*"[164].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Pemerintah Nagari telah berupaya menerapkan transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya

[162] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[163] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[164] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

pemahaman sebagian masyarakat terhadap informasi yang telah disampaikan sehingga tujuan transparansi belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana keterbukaan informasi terkait penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Keterbukaan informasi mengenai dana desa sendiri sudah dibuat dalam bentuk spanduk, pemasangan papan informasi mengenai anggaran, penyampaian laporan angggran mengenai kegiatan masyarakat*"[165].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana keterbukaan informasi terkait penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Jika pertanyaannya mengenai keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa bisa dilihat dari spanduk yang kita buat dan ditempelkan di papan informasi, kalau lebih ingin jelasnya boleh datang ke kantor nagari ini*"[166].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana keterbukaan informasi terkait penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Keterbukaan informasi ini bisa seperti pemasangan papan informasi mengenai anggaran dalam bentuk spanduk dan menyampaikan laporan anggaran mengenai kegiatan masyarakat*"[167].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana keterbukaan informasi

[165] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[166] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[167] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

terkait penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Keterbukaan informasi ini bisa seperti pemasangan papan informasi mengenai anggaran dalam bentuk spanduk dan menyampaikan laporan anggaran mengenai kegiatan masyarakat*"[168].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana keterbukaan informasi terkait penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Keterbukaan informasi ini misalnya dengan adanya pemasangan papan informasi mengenai anggaran dalam bentuk spanduk dan menyampaikan laporan anggaran mengenai kegiatan masyarakat*"[169].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Keterbukaan informasi terkait penggunaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah dilaksanakan melalui berbagai media informasi, seperti pemasangan spanduk dan papan informasi anggaran serta penyampaian laporan kegiatan kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi lebih lanjut dengan datang langsung ke kantor nagari. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah nagari untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan.

c. Adanya Hambatan Teknis

Dalam Pengelolaan Dana Desa ada faktor penghambat yang dihadapi

[168] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[169] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

dalam Pengelolaan Dana Desa salah satu indikatornya iyalah adanya hambatan teknis. Kondisi yang menunjukkan adanya kendala atau permasalahan yang bersifat teknis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai Apa saja hambatan teknis yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa"

"*Salah satu hambatannya mengenai BLT karena banyaknya keinginan masyarakat untuk memperoleh bantuan BLT ini tapi tidak bisa terakomodir dari anggarana yang telah ditetapkan dan kita sudah ditetapkan dana desa itu diwajibkan untuk BLT sebanyak 15% tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi mungkin itu salah satu hambatannya*"[170].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai Apa saja hambatan teknis yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai hambatan teknis mungkin salah satunya iyalah BLT, BLT ini merupakan salah satu program pemerintah yang dananya itu berasal dari dana desa yang jumlahnya 15% dari jumlah dana desa, jadi pemerintah harus teliti mengenai siapa yang berhak menerima bantuan itu, oleh karena itu perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu mengenai pembagiannya biasanya 2 orang/ kampung*"[171].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Apa saja hambatan teknis yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai hambatan saya kurang tau, mengkin itu pihak nagari yang lebih mengetahuinya, yang jelas kalau mengenai hambatan-hambatan pembangunan dari yang saya lihat terkadang pihak nagari mau membangun hambatannya ada sebagian masyarakat itu kadang-kadang tanahnya sudah di serahkan tetapi nyatanya dilapangan tidak jadi*

[170] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[171] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

diserahkan, mungkin itu salah satu hambatan yang saya ketahui"[172].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Apa saja hambatan teknis yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai hambatan saya kurang tau, mungkin itu pihak nagari yang lebih mengetahuinya, yang jelas kalau mengenai hambatan-hambatan pembangunan dari yang saya lihat terkadang cuaca yang ekstrim bisa memperlambatan pembangunan baik pembangunan jalan atau MCK*"[173].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Apa saja hambatan teknis yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Kalau mengenai hambatan saya kurang tau, mungkin itu pihak nagari yang lebih mengetahuinya*"[174].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Hambatan teknis dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur meliputi keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tingginya kebutuhan dan harapan masyarakat, kendala dalam proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, permasalahan lahan yang dapat menghambat realisasi program, serta faktor cuaca yang berpotensi memperlambat pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut menjelaskan bahwa:

---

[172] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib

[173] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[174] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

"*Kita tetap berdiskusi dengan jorong, dengan tokoh masyarakat, tokoh adat setempat dan juga ketua kampung mencari jalan keluarnya, mudah-mudahan dalam hal ini yang namanya kegiatan pasti ada kendala tetapi kita minimalnya kita perkecil permasalahan- permasalahan yang ada*"[175].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku Sekretaris Nagari mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut menjelaskan bahwa:

"*Mungkin salah satu langkahnya iyalah dengan memperhatikan siapa yang lebih membutuhkan misalnya ada orang yang berpenyakit menaun, jadi kita utamakan yang lebih membutuhkan, tetapi ini harus tetap dimusyawarahkan terlebih dahulu seperti berdiskusi dengan jorong, totok masyarakat, tokoh adat setempat, dan ketua kampung*"[176].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut menjelaskan bahwa:

"*Mengenai hambatan ini mungkin langkah-langkah yang diambil iyalah dilakukannya musyawarah kembali untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi itu dengan mengumpulkan jorong, tokoh masyarakat, tokoh adat dan ketua kampung, kiranya musyawarah ini menjadi jalan keluar supaya tahun-tahun berikutnya tidak terjadi hambatan lagi*"[177].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Apa saja hambatan teknis yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Mengenai hambatan ini mungkin langkah-langkah yang diambil iyalah dilakukannya musyawarah kembali untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi seperti mengumpulkan jorong, tokoh masyarakat, niniak mamak dan ketua kampung*"[178].

---

[175] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[176] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[177] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[178] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Apa saja hambatan teknis yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Mengenai hambatan ini mungkin langkah-langkah yang diambil iyalah dilakukannya musyawarah kembali untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi seperti mengumpulkan jorong, tokoh masyarakat, niniak mamak dan ketua kampung*"[179].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa, Langkah utama yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Dana Desa adalah melalui musyawarah dan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti jorong, tokoh masyarakat, tokoh adat (niniak mamak), ketua kampung, serta unsur masyarakat lainnya. Melalui musyawarah tersebut, pemerintah nagari berupaya mencari solusi terbaik, menentukan prioritas kebutuhan yang paling mendesak, serta meminimalkan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program.

d. Kurangnya Maksimal dalam Proses Audit dan Evaluasi

Dalam Pengelolaan Dana Desa ada faktor penghambat yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa salah satu indikatornya iyalah Kurang maksimal dalam proses audit dan evaluasi. Kondisi di mana kegiatan pemeriksaan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi dan sejauh mana dimanfaatkan untuk perbaikan dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan program.

[179] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Disamping kita setiap tahunnya membuat laporan itu ada pihak yang berwenang iyalah inspektorat melakukan pembinaan, alhamdulillah kita selalu memperkecil kesalah-kesalahan, dan juga kita dalam pengelolaan dana desa ini kita selalu berpijak pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, biasanya kita selalu dapat bimbingan dari inspektorat kabupaten*"[180].

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Pelaksanaan ini dilakukan secara berkala oleh pihak yang berwewenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, audit ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengelolaan dana desa dengan peraturan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, sementara itu evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program seta pencapaian tujuan yang diinginkan*"[181].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa"

"*Pelaksanaan audit dan evaluasi bisa dengan membuat laporan karena setiap tahunnya ada pihak yang berwenang dalam mengawasi pembinaan ini, dengan adanya tim atau pihak yang mengawasi maka aparatur nagari akan mendapatkan bimbingan dan tetap berpijak pada aturan-aturan yang telah diterapkan*"[182].

.

[180] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[181] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[182] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa:

"*Pelaksanaan audit dan evaluasi mungkin dengan membuat laporan terhadap program Dana Desa*"[183].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa:

"*Dengan membuat laporan setiap ada kegiatan yang dilaksanakan di nagari*"[184].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Audit dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah dilaksanakan secara berkala melalui pemeriksaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta evaluasi oleh pihak yang berwenang. Audit dan evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencegah terjadinya penyimpangan, serta mengidentifikasi kekurangan yang masih ada dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai sejauh mana hasil audit dan evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa:

---

[183] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[184]Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

"*Kalau mengenai hasil audit dan evaluasi juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, sehinga kesalahan yang sama dapat dikecilkan, dengan adanya hasil audit dan evaluasi ini pemerintah nagari dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada*"[185].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai mengenai sejauh mana hasil audit dan evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa:

"*Kalau mengenai hasil audit dan evaluasi dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki tata kelola dana desa pada tahun yang akan datang seperti kritik dan saran atau rekomendasi guna meningkatkan kualitas yang baik*"[186].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana hasil audit dan evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa:

"*Hasil audit dan evaluasi ini dimanfaatkan sebagai acuan dalam memperbaiki Pengelolaan Dana Desa agar menjadi lebih efektif, transparan dan akuntabel. Gunanya untuk mengidentifikasi kekurangan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan*"[187].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku masyarakat Nagari Padang mengenai sejauh mana hasil audit dan evaluasi

[185] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[186] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[187] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

dimanfaatkan untuk perbaikan Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa:

"*Hasil audit dan evaluasi ini dimanfaatkan sebagai acuan dalam memperbaiki pengelolaan dana desa agar menjadi lebih efektif, transparan dan akuntabel untuk tahun yang akan datang*"[188].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai sejauh mana hasil audit dan evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa:

"*Hasil audit dan evaluasi ini dimanfaatkan sebagai acuan dalam memperbaiki pengelolaan dana desa agar menjadi lebih efektif, transparan dan akuntabel untuk tahun yang akan datang*"[189].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Hasil audit dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa pada periode berikutnya. Hasil audit dan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengambilan keputusan dengan memperhatikan rekomendasi, kritik, dan saran yang diberikan.

e. Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kondisi di mana sebagian masyarakat memiliki tingkat pendidikan formal yang relatif rendah, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami informasi terkait Pengelolaan Dana Desa. Berikut

[188] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[189] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pemahaman terhadap Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Disamping kita memberikan sosialisasi kekampung-kampung kita memberikan gambaran dana desa sekian yang berhak untuk mendapat ini juga ada pos-posnya sesuai dengan 8 program pemerintah, dan juga kita membuat papan pengumuman, papan transparansi di meding-meding dana desanya sekian dan pengelolaannya selama januari sampai desember kita laporkan untuk secara umum, biasanya pengumuman itu diberitahu disetiap mesjid yang ada dikampung, balai-balai pemuda*"[190].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pemahaman terhadap Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Memang tingkat pendidikan sangatlah berpengaruh dalam pemahaman bagi masyarakat yang kurang paham dalam pengelolaan dana desa ini, oleh karena itu kita melakukan sosialisasi, pelatihan guna memanbah wawasan masyarakat yg belum paham mengenai pengelolaan dana desa ini*"[191].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pemahaman terhadap Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Jika dilihat dari tingkatan pendidikan masyarakat sangatlah*

[190] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

[191] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

berpengaruh karena rata-rata masyarakat ini pendidikannya kebanyakan tammatan SD bahkan ada yang buta huruf, Namun demikian pemerintah nagari tetap berupaya menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami agar seluruh masyaraakat dapat memahami pengelolaan dana desa tanpa membeda-bedakan tingkat pendidikan"[192].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pemahaman terhadap Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Tingkat pendidikan masyarakat sangatlah berpengaruh karena rata-rata masyarakat ini pendidikannya kebanyakan tammatan SD bahkan ada yang buta huruf, Namun demikian pemerintah nagari tetap berupaya menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami*"[193].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Masitoh selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pemahaman terhadap Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Jika dilihat dari tingkatan pendidikan masyarakat sangatlah berpengaruh karena rata-rata masyarakat ini pendidikannya kebanyakan tammatan SMP lah yang paling tinggi oleh karena itu peran pemerintah nagari itu sangat penting bagi masyarakat*"[194].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Tingkat pendidikan masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.

[192] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[193] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

[194] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi, program pembangunan, dan mekanisme pengelolaan Dana Desa menjadi beragam. Kondisi ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, bahkan terdapat yang belum mampu membaca dan menulis dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah nagari berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan serta penyampaian informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga seluruh masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrial R selaku Kepala Wali Nagari mengenai Sejauh mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkaan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

> "*Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini pemerintah nagari sangat berupaya dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam sosialisasi program yang dijalankan dan bertanya kepada masyarakat apakah ada kendala atau ada yang dibutuhkan dikampung-kampung tersebut*"[195].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat Selaku Sekretaris Nagari mengenai Sejauh mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkaan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa,

[195] Hasil Wawancara dengan Bapak Syafrial R (Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:32 Wib.

"*Sebenarnya Nagari sudah berupaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi mengenai Pengelolaan Dana Desa ini tetapi terkadang masyarakat acuh tak acuh saja, namun Pemerintahan Nagari tetap berusaha mengajak masyarakat suapaya ikut serta dalam Pengelolaan Dana Desa ini salah satunya dengan diadakannya sosiaslisasi kekampung-kampung*"[196].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkaan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Cara yang dilakukan iyalah dengan mengajak ataupun melibatkan masyarakat dalam musyawarah nagari, melibatkan dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan juga memberikan informasi terkait program dan penggunaan anggaran secara terbuka agar masyarakat berperan aktif dalam memberikaan masukan maupun pegawasan dengan adanya partisipasi masyarakat sehingga Pengelolaan Dan Desa ini menjadilebih transpara dan akuntabel mungkinitu bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkannya*"[197].

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Asri selaku Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkaan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Cara yang dilakukan iyalah dengan mengajak ataupun melibatkan masyarakat dalam musyawarah nagari, melibatkan dalam kegiatan perencanaan seperti diadakannya pelatihan*"[198].

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Masitoh selaku

[196] Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Hidayat (Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:05 Wib.

[197] Hasil Wawancara dengan Bapak Usman (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 07 Mei 2026), Pukul 11:52 Wib.

[198] Hasil Wawancara dengan Ibuk Asri (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 10:47 Wib.

Masyarakat Nagari Padang Gelugur mengenai Sejauh mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkaan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa:

"*Cara yang dilakukan iyalah dengan diadakannya pelatihan seperti pelatihan budidaya belut, kalau untuk ibuk-ibuk itu ada pelatihan pembuatan kue kering, kemudian untuk anak muda juga ada pelatiahn wirausaha*"[199].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya, Pemerintah Nagari Padang Gelugur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa melalui sosialisasi, musyawarah nagari, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan, penyampaian informasi secara terbuka, serta penyelenggaraan berbagai program pelatihan dan pemberdayaan. Upaya tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang peduli atau belum aktif terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pemberdayaan yang lebih berkelanjutan agar keterlibatan masyarakat dapat terus meningkat sehingga pengelolaan Dana Desa menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

[199] Hasil Wawancara dengan Ibuk Masitoh (Sebagai Masyarakat Nagari Padang Gelugur, 10 Juni 2026), Pukul 11:43 Wib.

D. Hasil Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman Berdasarkan Perencanaan, Pelaksanaan, Transparansi, Akuntabilitas dan Keadilan.

Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari. Penerapan kelima prinsip tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Nagari dalam mengelola Dana Desa secara efektif, efesien, dan beriorentasi pada kesejahteraan masyarakat (Andi Ulfah ramdahani (2025)[200].

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, Proses perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah dilaksanakan secara partisipatif melalui Musyawarah Nagari (Musrenbang) dengan melibatkan Pemerintah Nagari, Kepala Jorong, Niniak Mamak, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun menjadi dasar dalam penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Selain itu, Pemerintah Nagari juga menerapkan pemerataan pembangunan antarjorong agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara merata. Namun, masih terdapat

[200] Andi Ulfah Ramadhani, analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjani Selatan Kabupaten Sinjai, *Jurnal Of Economy Business Development*, Vol. 3 No. 2 (2025)

sebagian masyarakat yang belum memahami proses penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyampaian informasi oleh Pemerintah Nagari.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu pada Aspek perencanaan di Desa Pataruman, Menunjukkan bahwa Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, agenda kegiatan yang jelas. Pemerintah Desa Pataruman menyusun program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. perencanaan dimulai dari musrenbang tingkat desa. Perencanaan pembangunan Desa meliputi: RPJMDesa dan RKPDesa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah Desa telah menyelenggarakan musyawarah dengan mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. Musrenbang desa dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan juli. Musrenbang dihadiri oleh BPD, Rt/Rw dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah. Proses Perencaan pembangunan dibuat dalam RKP Desa (Rencana Kegiatan Pembangunan) setelah itu dimuat dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk penyusunan APBDes yaitu Anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan

desa.[201]

Adapun hasil analisis perbandingan Aspek Perencanaan antara hasil penelitian terdahulu di desa pataruman dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis perbandingan, penelitian di Nagari Padang Gelugur dan penelitian terdahulu di Desa Pataruman, Sama-sama menunjukkan bahwa proses perencanaan Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai dasar penyusunan RKP Nagari/RKP Desa serta APB Nagari/APBDes. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menentukan prioritas pembangunan.

Perbedaannya, penelitian di Desa Pataruman lebih menekankan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan fokus program pembangunan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sementara itu, penelitian di Nagari Padang Gelugur lebih menekankan penyusunan skala prioritas berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerataan pembangunan antarjorong. Selain itu, penelitian ini juga menemukan masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap proses perencanaan, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi agar partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

[201] Firli Ramdani dkk, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Aspek Perencanaan Di Desa Pataruman, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntasi*, Vol. 10 No. 13, (2024) hal.1738

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Pengelolaan Dana Desa khususnya pada aspek perencaan sejalan dengan Penelitian Firli Ramdani (2024) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Dana harus melalui proses perencanaan hingga penyusunan RKPDesa dan RPJMDesa dan melalui Musrenbang.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang gelugur, Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan sesuai dengan hasil Musyawarah Nagari dan kebutuhan masyarakat. Program yang direalisasikan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti jalan usaha tani, MCK, dan fasilitas umum lainnya, dengan melibatkan perangkat nagari, lembaga nagari, serta unsur masyarakat. Meskipun terdapat kendala teknis berupa permasalahan pembebasan lahan dan faktor cuaca yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami penundaan, kendala tersebut tidak menghambat pelaksanaan program secara keseluruhan. Dengan demikian, pelaksanaan Dana Desa telah berjalan dengan baik, bersifat partisipatif, dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu pada aspek pelaksanaan di Desa Neglasari, Menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan dalam program pencegahan *Stunting* telah selaras dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

manajemen Keuangan Desa dan didukung teori dari George R. Terry, Dimana Pemerintah Desa Neglasari melaksanakan Proses penyaluran dana desa melibatkan beberapa tahapan penting, perancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB), penyediaan barang dan jasa, permohonan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pembayaran, Penerbitan kwitansi, Pengerjaan buku kas pembantu kegiatan oleh pelaksana kegiatan dan bendahara desa, Persetujuan petinggi desa atas semua rencana kegiatan, Pengawasan oleh pihak desa pelaksanaan dana desa untuk mengetahui pelaksanaan tugas yang diberikan selaras dengan ketetapan juga sasaran yang akan dicapai.

Adapun hasil analisis perbandingan aspek Pelaksanaan antara hasil penelitian terdahulu di desa Neglasari dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari telah berjalan sesuai dengan ketentuan, namun masih menghadapi kendala berupa kurang optimalnya transparansi dalam penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat.

Sementara itu, hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan padang Gelugur Kabupaten Pasaman bahwasanya, Pelaksanaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai hasil Musyawarah Nagari dan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi lebih bersifat

teknis, seperti permasalahan pembebasan lahan dan faktor cuaca, sehingga tidak memengaruhi pelaksanaan program secara keseluruhan. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa telah berjalan dengan baik, namun perbedaannya terletak pada jenis kendala yang dihadapi, yaitu aspek transparansi pada penelitian terdahulu dan aspek teknis pada penelitian di Nagari Padang Gelugur.

Namun, perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang dihadapi. Penelitian di Desa Neglasari menekankan pentingnya peningkatan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, sedangkan penelitian di Nagari Padang Gelugur menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berlangsung secara partisipatif dan efektif, dengan kendala yang lebih bersifat teknis daripada *administrative*.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Pengelolaan Dana Desa khususnya pada aspek pelaksanaan sejalan dengan Penelitian Gina Parida (2025)[202], yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

c. Transparansi

Berdasarkan hasil peneltian, Pemerintah Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan menyediakan

[202] Gina Parida dkk, Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pencegahan *Stunting* Di Desa Neglasari, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10. No. 2 (2025) hal.1198

informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran melalui spanduk, baliho, dan papan informasi. Selain itu, masyarakat juga diberikan akses untuk memperoleh informasi secara langsung di Kantor Nagari. Upaya tersebut menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah nagari dalam menyampaikan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan program dan pengelolaan Dana Desa dengan cukup baik.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu pada aspek Transparansi di Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Menunjukkan bahwa tahap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sudah transparan. Transparansi pengelolaan dana desa dapat dilihat dari Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Adapun hasil analisis perbandingan Aspek Transparansi antara hasil penelitian terdahulu di Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur sebagai berikut:

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Pengelolaan Dana Desa khususnya pada aspek transparansi sejalan dengan Penelitian Yulia Nurjannah (2022)[203], yang menyatakan bahwa

[203] Yulia Nurjannah dkk, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 8 No. 1 (2022), hal. 31

transparansi Pengelolaan Dana telah dilaksanakan sesuai yang diterapkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat.

d. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Nagari Padang Gelugur, kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa melalui pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan APB Nagari, serta penyusunan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pihak terkait, pelaporan dan evaluasi tersebut juga menjadi sarana untuk menilai keberhasilan program sehingga pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana secara akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu pada Aspek Akuntabilitas di Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, bahwasanya, hasil menunjukkan kompetensi aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal dan penggunaan teknologi informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian secara simultan seluruh variabel penelitian secara bersama- sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Adapun hasil analisis perbandingan aspek Akuntabilitas antara hasil penelitian terdahulu di Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu di Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, bahwasanya, Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tertib.

Sementara itu hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman bahwasanya, Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan program sesuai APB Nagari serta penyusunan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban secara rutin sesuai ketentuan. Sementara itu, penelitian terdahulu menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa dan ketaatan dalam pelaporan keuangan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya pelaksanaan program yang sesuai perencanaan dan pelaporan yang tertib sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Pengelolaan Dana Desa khususnya pada aspek Akuntabilitas sejalan dengan Penelitian Heni Risnawati (2022)[204] yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana telah dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan kegiatan yang tertib dan pelapoan yang sesuai.

[204] Heni Risnawati, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol.6 No.1 (2022), hal 204.

e. Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian, Prinsip keadilan dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman telah diterapkan melalui penetapan program berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat serta pemerataan alokasi anggaran antarjorong. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan pembangunan dan pemberian bantuan yang dapat dirasakan secara cukup merata oleh masyarakat, seperti pembangunan jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan program lainnya. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Nagari Padang Gelugur.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu pada aspek Keadilan bahwasanya keadilan sosial dalam kebijakan Dana Desa penting untuk memastikan distribusi manfaat yang adil, khususnya bagi kelompok rentan, guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Ketidakadilan dalam implementasi sering muncul akibat dominasi kepala desa, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan ketidak merataan alokasi. Faktor penyebabnya meliputi perbedaan interpretasi kebijakan, fokus pada pembangunan fisik, rendahnya partisipasi dan transparansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Adapun hasil analisis perbandingan Aspek Keadilan, dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan Dana Desa diwujudkan melalui pemerataan manfaat pembangunan dan pengalokasian program sesuai kebutuhan masyarakat. Perbedaannya, penelitian terdahulu masih menemukan kendala berupa ketidakmerataan alokasi anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan dominasi dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah diterapkan dengan cukup baik melalui penetapan program berdasarkan skala prioritas dan pemerataan alokasi anggaran antarjorong, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Pengelolaan Dana Desa khususnya pada aspek Keadilan sejalan dengan Penelitian Irman Puansah (2024)[205], yang menyatakan bahwa keadilan diwujudkan melalui pemerataan manfaat pembangunan dan pengalokasian program sesuai kebutuhan masyarakat.

[205] Irman Puansah ddk, Keadilan Sosial dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 (2024) hal. 2008

2. Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman Amanah, Keadilan, Tauhid, Maslahah, dan khalifah.

Pengelolaan Dana Desa dikatakan baik apabila dilaksanakan dengan menjalankan lima prinsip utama yaitu, Amanah, Keadilan, Tauhid, Maslahah, dan Khalifah. Amanah menuntut nilai kejujuran dan tanggungjawab, Keadilan menjamin pemerataan manfaat pembangunan, Tauhid menjadi landasan moral dan spritual dalam pengambilan keputusan, Maslahah mengarahkan seluruh program untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir Khalifah menegaskan tanggungjawab aparatur desa sebagai pengelola sumber daya publik secara profesional dan berkelanjutan[206] (Sulaeman Kurdi, 2024)

a. Amanah

Berdasarkan hasil penelitian, Prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah diterapkan melalui penggunaan anggaran sesuai ketentuan, pelaksanaan program sesuai perencanaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selain itu, penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan pelaksanaan tugas yang penuh tanggung jawab menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah mengelola Dana Desa secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

[206] Sulaeman Kurdi, Sistem Pengelolaan Dan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syaraiah, (Studi Kasus di Desa Kebondalem kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, (2024).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di desa wonorejo timur menunjukan bahwasanya, Pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Kemudian tahap pengelolaan Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa, dan terkait Pertanggungjawaban yakni laporan pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada masyarakat secara periodik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, Pemerintah desa Wonorejo Timur telah melakukan tanggung jawabnya secara vertikal maupun horizontal yang dimana sesuai dengan konsep Amanah, Terwujudnya *Good Village Governance* di desa Wonorejo Timur yang mencakup terpenuhinya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Adapun hasil analisis perbandingan Aspek Amanah antara hasil penelitian terdahulu di desa Wonorejo timur dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu di desa wonorejo timur yang menunjukkan bahwasanya, Prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Desa diwujudkan melalui pelaksanaan program sesuai ketentuan, transparansi, akuntabilitas, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan di Nagari Padang Gelugur, prinsip amanah tercermin dari penggunaan anggaran sesuai perencanaan, keterbukaan informasi kepada masyarakat, pelaksanaan tugas yang

bertanggung jawab, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Sementara itu, penelitian terdahulu di Desa Wonorejo Timur juga menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban secara vertikal maupun horizontal telah mencerminkan konsep amanah dan mendukung terwujudnya *Good Village Governance*.

Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa penerapan prinsip amanah menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang baik.

Dalam Pengelolaan Dana Desa ini jika dilihat dari perspektif ekonomi islam khususnya memabahas tentang amanah dalam QS. Al-Anfal : 27 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui (QS. Al-Anfal :27)[207].

Dari ayat di atas Bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada ummatnya, agar Menjalakan tugas harus sesuai dengan amanah yang telah di percayakan oleh masyarakat kepada kita, karena apabila masyarakat telah memberi amanah kepada kita berarti kita mampu untuk menjaga amanah-nya

[207] QS Al-Anfal : 27

dan apabila masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada kita maka kepercayaan itu jangan di khianati. Dari Ayat diatas telah dijelaskan bahwa apabila kita diberi amanah untuk menegakkan keadilan maka tegakkanlah keadilan itu seadil-adilnya.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Pengelolaan Dana Desa di tinjau dari perspetif ekonomi Islam khususnya pada aspek Amanah sejalan dengan Penelitian Rustam dkk (2022)[208] yang menyatakan bahwa Amanah diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang bertanggungjawab, transparansi, akuntabilitas, dan penyususnan laporan pertanggungjawabn sesuai ketentuan.

b. Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian, Prinsip keadilan dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah diterapkan melalui penetapan program berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat, pemerataan pembangunan, serta penyaluran bantuan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Proses pendistribusian dilakukan melalui pendataan dan musyawarah sehingga bantuan tepat sasaran dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil peneliitian terdahulu di desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah bahwasanya, Pengelolaan ADD oleh aparatur desa pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan

[208] Rustam dkk, Konsep Amanah Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance, *Jurnal ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol.7 No.2 (2021), hal. 244-254

prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan bersama. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan ADD harus dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun hasil analisis perbandingan Aspek Keadilan antara hasil penelitian terdahulu di Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu di Desa Penum Kecamatan Bengkulu Tengah yang menunjukkan bahwa, Prinsip keadilan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan salah satu dasar dalam pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Prinsip keadilan diterapkan melalui penetapan program berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, pemerataan pembangunan, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran melalui pendataan dan musyawarah. Sementara itu, penelitian terdahulu di desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah menegaskan bahwa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu

mengedepankan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab, meskipun masih ditemukan kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur menunjukkan penerapan prinsip keadilan yang lebih optimal dalam proses pengelolaan Dana Desa.

Dalam Pengelolaan Dana Desa ini jika dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam khususnya memabahas tentang Keadilan dalam (Q.S An-Nisa (4) : 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝٥٨

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S An-Nisa (4) : 58[209].

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, ayat ini memberikan pedoman bahwa pemerintah nagari sebagai penerima amanah wajib mengelola Dana Desa secara adil dengan menetapkan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, skala prioritas pembangunan, serta memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Keadilan tidak berarti membagikan anggaran dalam jumlah yang sama kepada setiap individu, melainkan menempatkan alokasi dana sesuai

[209] Q.S An-Nisa : 58.

kebutuhan, kondisi, dan tingkat urgensi masing-masing kelompok masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Pengelolaan Dana Desa di tinjau dari perspetif ekonomi Islam khususnya pada aspek Amanah sejalan dengan Penelitian Remi Kartina dkk (2025)[210], yang menjelaskan bahwa Keadilan diwujudkan melalui keadilan dalam efesiensi anggaran dan penyaluran unntuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Tauhid

Berdasarkan hasil penelitian, Prinsip tauhid dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur tercermin melalui pelaksanaan tugas yang dilandasi kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Nilai tersebut diwujudkan dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta penggunaan Dana Desa yang berpedoman pada peraturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah bahwasanya, Pengelolaan ADD oleh aparatur desa pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya

[210] Remi Kartina dkk, Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus di Desa Penum Kecamatan Bengkulu Tengah), *Jurnal Manajemen Modal Insani dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1 (2025), hal. 275

pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan bersama. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan ADD harus dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun hasil analisis perbandingan Aspek Tauhid antara hasil penelitian terdahulu di Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu di desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menunjukkan bahwa, Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu di Nagari Padang Gelugur, prinsip tauhid tercermin melalui pelaksanaan tugas yang dilandasi kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Sementara itu, penelitian terdahulu menekankan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengedepankan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian di Nagari Padang Gelugur menunjukkan bahwa nilai tauhid telah

diimplementasikan sebagai landasan moral dan spiritual dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga memperkuat penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Dalam Pengelolaan Dana Desa ini jika dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam khususnya memabahas tentang Tauhid dalam (Q.S Al-Baqarah (2) : 163.

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

Artinya:

> *Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang* Q.S Al-Baqarah (2) : 163[211].

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, nilai tauhid menuntut aparatur nagari untuk menjalankan amanah dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, kecurangan, maupun kepentingan pribadi. Kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT menjadi landasan moral bagi aparatur nagari dalam mengambil keputusan dan mengelola Dana Desa secara benar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang

[211] Q.S Al-Baqarah : 163

Pengelolaan Dana Desa di tinjau dari perspetif ekonomi Islam khususnya pada aspek Tauhid memiliki keterkaitan dengan Penelitian Remi Kartina dkk (2025)[212] yang menjelaskan bahwa Tauhid merupakan landasan utama bagi seluruh aktivitas ekonomi, termasuk Pengelolaan Keuangan Publik.

d. Mashalah

Berdasarkan hasil penelitian, Prinsip Maslahah dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah diterapkan melalui pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan manfaat yang luas. Hal tersebut diwujudkan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak serta pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas MCK, yang mendukung aktivitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga menunjukkan bahwasanya, Telah merencanakan pengelolaan dana desanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan pembangunan diantaranya dalam bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat seperti program pemerintah desa Bagik Payung untuk masyarakatnya membuat beberapa program pemberdayaan masyarakat diantaranya, yaitu pemberian modal usaha untuk para pelaku UMKM, pembangunan taman tugu, pembangunan jalan serta pembangunan talud jalan (pembatas). Selain itu pemerintah telah menerapkan prinsip dasar dalam pemerintahan desa yaitu prinsip keadilan,

[212] Remi Kartina dkk, 2025

keseimbangan dan tanggung jawab sehingga dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat telah memenuhi prinsip dasar etika Islam dalam pengelolaan dana desa.

Adapun hasil analisis perbandingan aspek Maslahah antara hasil penelitian terdahulu di Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu di Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam perspektif ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Semetara di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Prinsip *maslahah* diwujudkan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak serta pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas MCK, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, penelitian terdahulu di Desa Bagik Payung menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah desa juga menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sebagai dasar etika Islam. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang

berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam mampu memberikan kemanfaatan (*maslahah*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pengelolaan Dana Desa ini jika dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam khususnya memabahas tentang Maslahah dalam (Q.S Al-Baqarah (2) : 163.

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

Artinya:

> *Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang* Q.S Al-Baqarah (2) : 163[213].

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, nilai tauhid menuntut aparatur nagari untuk menjalankan amanah dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, kecurangan, maupun kepentingan pribadi. Kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT menjadi landasan moral bagi aparatur nagari dalam mengambil keputusan dan mengelola Dana Desa secara benar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Pengelolaan Dana Desa di tinjau dari perspetif ekonomi Islam khususnya pada aspek Maslahah memiliki keterkaitan dengan Penelitian Siti

[213] Q.S Al-Baqarah : 163

Raihanum dkk (2025)[214] yang menjelaskan bahwa Maslahah diwujudkan melalui pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

e. Khalifah

Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah memberikan kemaslahatan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui pelatihan di bidang pertanian, budidaya, dan kewirausahaan yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta membuka peluang peningkatan taraf hidup masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sijabut Teratai mencapai 80,87% dan tergolong cukup efektif. Kendala yang dihadapi meliputi pembebasan lahan, keberadaan tiang listrik, pohon besar, dan faktor cuaca. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan Dana Desa telah mencerminkan lima pondasi pembangunan Islam, yaitu tauhid, khalifah, keadilan, tazkiyyah, dan al-falah, yang diwujudkan melalui pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerataan pembangunan, pelaksanaan amanah pemerintah desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

[214] Siti Raihanum dkk, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Bagik Payung Kecamatan Suragala), *Jurnal Of Islamic Laws and Studies*, Vol. 4 No. 2 (2025), hal. 718

Adapun hasil analisis perbandingan Aspek Khalifah antara hasil penelitian terdahulu di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam perspektif ekonomi Islam berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Prinsip *maslahah* diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan di bidang pertanian, budidaya, dan kewirausahaan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, penelitian terdahulu di Desa Sijabut Teratai menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang cukup efektif telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam melalui pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam mampu memberikan kemaslahatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun penelitian terdahulu masih menemukan beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya.

Dalam Pengelolaan Dana Desa ini jika dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam khususnya memabahas tentang Khalifah dalam (Q.S Al-Baqarah (2) : 30.

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Q.S Al-Baqarah (2) : 30[215].

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, prinsip khalifah mengharuskan pemerintah nagari mengelola Dana Desa sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Pengelolaan Dana Desa di tinjau dari perspetif ekonomi Islam khususnya pada aspek Khalifah memiliki keterkaitan dengan Penelitian Nurbaiti dkk (2022)[216] yang menjelaskan bahwa Khalifah menciptakan kemanfaatan

[215] Q.S Al-Baqarah (2): 30

[216] Nurbaiti dkk, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Sijabut Tratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan), Vol. 3 No. 1, (2022), hal. 98

dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

3. Faktor Penghambat yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Dana Desa, di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman Berdasarkan Kompetensi SDM Masih Kurang, Kurangnya Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Adanya Hambatan Teknis, Kurangnya Maksimal dalam Proses Audit dan Evaluasi, Rendahnya Pendidikan Masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari faktor penghambat baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Kedua faktor ini sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya Pengelolaan Dana Desa, jika ada salah satu faktor yang memiliki kendala maka Proses Pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan lancar. Adapun faktor internalnya iyalah kompetensi aparatur yang masih terbatas, belum optimalnya transparansi, serta kelemahan dalam audit dan evaluasi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup hambatan teknis, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berdampak pada partisipasi publik[217] (Putri Agustina, 2025).

a. Komptensi Sumber Daya yang Masih Kurang

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi sumber daya manusia masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Nagari telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas melalui

[217] Putri Agustina, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Review Akuntasi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 9 No. 3, (2025).

pelatihan, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman aparatur nagari dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas SDM yang tinggi, terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan, memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa dan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat, diversifikasi sumber pendapatan, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam kesuksesan ini.

Adapun hasil analisis perbandingan aspek Kompetensi Sumber Daya yang Masing Kurang antara hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam pengelolaan Dana Desa. Pada penelitian di Nagari Padang Gelugur, kompetensi SDM masih menjadi salah satu faktor penghambat sehingga pemerintah nagari berupaya meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas SDM yang tinggi, didukung oleh pendidikan, keterampilan, pemberdayaan

masyarakat, dan pemanfaatan teknologi, mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa khususnya pada aspek Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Masih Kurang memiliki keterkaitan dengan Penelitian Sutra Ridena Koesherawaty dkk (2024)[218] yang menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

b. Kurangnya Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Nagari Padang Gelugur telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa melalui penyampaian informasi menggunakan spanduk, papan informasi, laporan kegiatan, serta layanan informasi di kantor nagari. Namun, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap informasi yang disampaikan masih menjadi kendala sehingga pelaksanaan transparansi belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Kecamatan Dampelas

[218] Sutra Ridena Koesherawaty dkk, Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium*, Vol. 01 No. 2, (2024) hal. 12-23

Kabupaten Donggala menunjukkan, Pengelolaan Dana Desa di Desa Budi Mukti menghadapi tantangan dalam aksesibilitas dokumen, kejelasan informasi, dan partisipasi masyarakat. Meski regulasi transparansi tersedia, implementasinya kurang optimal karena keterbatasan pemahaman perangkat desa dan masyarakat. Perbaikan komunikasi dan pelibatan aktif masyarakat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Adapun hasil analisis perbandingan pada aspek Kurangnya Transparansi Pengelolaan Dana Desa antara hasil penelitian terdahulu di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala. Di Nagari Padang Gelugur, pemerintah nagari telah berupaya menerapkan transparansi melalui penyampaian informasi menggunakan spanduk, papan informasi, laporan kegiatan, dan layanan informasi di kantor nagari. Namun, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap informasi yang disampaikan menyebabkan transparansi belum terlaksana secara optimal.

Demikian pula, penelitian terdahulu di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala menemukan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa masih terkendala oleh aksesibilitas dokumen,

kejelasan informasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa peningkatan komunikasi, sosialisasi, dan pelibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang lebih optimal.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa khususnya pada aspek Kurangnya Transparansi Pengelolaan Dana Desa memiliki keterkaitan dengan Penelitian Andre Pramatama dkk (2025)[219], yang menjelaskan bahwa upaya transparansi telah dilakukan oleh pemerintah desa/nagari, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala yang berkaitan dengan pemahaman dan partisipasi masyarakat**.**

c. Adanya Hambatan Teknis

Berdasarkan hasil penelitian, Hambatan teknis dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur meliputi keterbatasan anggaran, kendala administrasi dan pelaksanaan pembangunan, permasalahan lahan, serta faktor cuaca. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Nagari melakukan musyawarah dan koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat guna menentukan solusi dan menetapkan prioritas program sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi

[219] Andre Pratama dkk, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2, (2025), hal. 58-75.

dana desa mencakup komunikasi, sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, komitmen serta birokrasi. Adanya Peran dan tanggungjawab pemerintah desa, aparat desa maupun masyarakat dalam mengelola dana desa berdasarkan pada mekanisme dan program-Program yang dianggarkan. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa baik secara eksternal maupun internal. Tantangan secara eksternal berupa perubahan regulasi yang menyulitkan penyiapan dokumen-dokumen. Tantangan secara internal lebih menjurus kepada ke siapan dokumen persyaratan guna melakukan proses pencairan dan realisasi anggaran. Ada juga hambatan yang dihadapi yaitu secara internal ialah terkait peraturan regulasi yang sering menjadi hambatan dalam proses pencairan dana desa. Secara eksternal yaitu kesulitan yang dihadapi terkait proses pencairan ataupun realisasi kepada sasaran penerima anggaran. Selain itu ada juga proses evaluasi pengeloaan dana desa yang terdiridari proses evaluasi, mekanisme koordinasi dan konsultasi, peran di desa sebagai anggota masyarakat, pengetahuan tentang dana desa dan pengelolaan dana desa.

Adapun hasil analisis perbandingan pada Aspek Adanya Hambatan Teknis antara hasil penelitian terdahulu di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu

di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai hambatan teknis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di Nagari Padang Gelugur, hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, kendala administrasi, permasalahan lahan, dan faktor cuaca yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan. Meskipun jenis hambatan yang ditemukan berbeda, kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa koordinasi, kesiapan administrasi, dan penguatan tata kelola menjadi faktor penting dalam mengatasi hambatan serta mendukung pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa khususnya pada aspek Adanya Hambatan teknis memiliki keterkaitan dengan Penelitian Gallex Simbolon dkk (2022)[220], yang menjelaskan bahwa Pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai hambatan teknis yang mempengaruhi pelaksanaan program.

d. Kurang Maksimal dalam Proses Audit dan Evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian Audit dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur telah dilaksanakan secara berkala melalui pemeriksaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan evaluasi oleh pihak yang berwenang. Hasil audit dan evaluasi dimanfaatkan sebagai

[220] Gallex Simbolon, Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Tanatangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata), *Jurnal Prosi PLS Universitas Nusa Cendana*, Vol. 1 No. 2, (2022)

dasar perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan sehingga pengelolaan Dana Desa pada periode berikutnya dapat dilaksanakan secara lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes telah memberikan kemudahan dalam memfasilitasi proses pelaporan dana desa karena dapat mengurangi beban administrasi. Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi Siskeudes bisa digunakan untuk tujuan audit karena dapat menjaga histori transaksi dan sangat kompatibel dalam penggunaannya. Hal ini sangat membantu para aparatur pemerintahan desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa melalui pemanfaatan aplikasi Siskeudes proses audit dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi sebagai indikator utama tata kelola keuangan desa.

Adapun hasil analisis perbandingan pada Aspek kurang Maksimal dalam Proses Audit dan Evaluasi antara hasil penelitian dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama menunjukkan bahwa audit dan evaluasi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Dana

Desa. Pada penelitian di Nagari Padang Gelugur, audit dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui pemeriksaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan evaluasi oleh pihak yang berwenang, kemudian hasilnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan.

Sementara itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi Siskeudes mendukung kelancaran proses pelaporan, audit, dan evaluasi sehingga mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan audit dan pemanfaatan hasil evaluasi, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan peran teknologi melalui aplikasi Siskeudes dalam mendukung proses audit dan evaluasi. Namun demikian, kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa audit dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa khususnya pada aspek Kurang Maksimal dalam Proses Audit dan Evaluasi memiliki keterkaitan dengan Penelitian Bambang Arianto dkk (2024)[221], yang menjelaskan bahwa audit dan evaluasi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan

[221] Bambang Arianto dkk, Studi Fenomenologi Tata Kelola Dana Desa Berbasis Aplikasi Sistem keuangan desa, *Jurnal Akuntansi Auditing & Investasi*, Vol. 4 No. 2, (2024)

kualitas pengelolaan Dana Desa.

e. Rendahnya Pendidikan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat memengaruhi pemahaman dan partisipasi mereka dalam pengelolaan Dana Desa. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Nagari Padang Gelugur telah melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi, musyawarah, penyampaian informasi yang mudah dipahami, serta program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan upaya yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil peneltian terdahulu di desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang menunjukkan bahwasanya, Partisipasi masyarakat Desa Pucanggading dalam pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan baik. Pada tahap perencanaan, masyarakat berpartisipasi melalui kehadiran dalam musyawarah desa, meskipun tidak seluruh masyarakat menyampaikan usulan atau pendapat. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk swadaya, menjadi tenaga kerja, bergotong royong, serta mengikuti berbagai program pelatihan yang diselenggarakan desa. Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan, masyarakat juga berpartisipasi secara aktif melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa mengenai Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJ

APBDes), sehingga partisipasi masyarakat dinilai berjalan dengan baik dan optimal. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu adanya pemberian insentif, dukungan, keterbukaan, dan komitmen dari masyarakat maupun pemerintah desa. Adapun faktor-faktor penghambat meliputi, pencairan Dana Desa yang dilakukan secara bertahap, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta kesibukan masyarakat dalam bekerja, belum optimalnya komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Adapun hasil analisis perbandingan pada Aspek Rendahnya Pendidikan Masyarakat antara hasil penelitian terdahulu di Desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabuapten Batang dengan hasil penelitian di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan penelitian terdahulu di Desa Pucanggading karena sama-sama menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Kedua penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa/nagari telah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, musyawarah, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Perbedaannya, penelitian di Nagari Padang Gelugur lebih menekankan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman

masyarakat melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian di Desa Pucanggading menjelaskan secara lebih rinci bentuk partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, seperti pencairan dana yang bertahap, kesibukan masyarakat, dan belum optimalnya komunikasi.

Berbagai Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan tentang Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa khususnya pada aspek Rendahnya Pendidikan Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Penelitian Sisca Meriani Wulandari dkk (2022)[222], yang menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, sosialisasi yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

[222] Sisca Meriani Wulandari dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang), *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 4, (2022) hal. 745

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Nagari Padang gelugur, Kecamatan Padang Geluugur, Kabupaten Pasaman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Nagari Padang Gelugur Secara Umum telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pada tahap perencanaan, pemerintah Nagari telah melibatkan masyarakat melalui musyawarah Nagari untuk menetukan program prioritas. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang didanai Dana Desa telah direalisasikan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Dari aspek transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Nagari telah berupaya memberikan informasi serta menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Sementara itu, dari aspek keadilan, program dan kegiatan pembangunan telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata tanpa membedakan kelompok tertentu.
2. Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Nagari Padang Gelugur jika Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam telah mencerminkan prinsip-prinsip amanah, keadilan, tauhid, maslahah, dan khalifah,

meskipun pelaksanaannya belum optimal.Prinsip amanah terlihat dari upaya Pemerintah Nagari dalam melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Prinsip keadilan tercermin dari pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Prinsip tauhid diwujudkan melaluii kesadaran bahwa Pengelolaan Dana Desa merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT. Prinsip maslahah tampak dari pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan prinsip khalifah tercermin dalam tanggungjawab Pemerintah Nagari sebagai pengelola sumber daya yang dipercayakan untuk kemakmuran masyarakat.

3. Terdapat beberapa faktor hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Padang Gelugur, yaitu masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia aparatur nagari dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, kurang optimalnya transparansi informasi kepada masyarakat, adanya hambatan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, belum maksimalnya proses audit dan evaluasi, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berpengaruh terhadap pemahaman dan antisipasi dalam pengelolaan Dana Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Nagari Padang Gelugur, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur nagari melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan desa, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Kemudian dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa melalui media informasi yang mudah diakses, seperti baliho, papan informasi, maupun media digital, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi penggunaan anggaran desa.
2. Bagi Masyarakat Nagari Padang Gelugur, diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program Dana Desa agar Pengelolaan Dana Desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan Bersama.
3. Dalam perspektif ekonomi Islam**,** Pemerintah Nagari diharapkan terus memperkuat penerapan nilai-nilai amanah, keadilan, maslahah, tauhid, dan khalifah dalam setiap tahapan

pengelolaan Dana Desa, sehingga dana yang dikelola tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan, bagi seluruh masyarakat Nagari Padang Gelugur.

4. Bagi peneliti selanjutnya**,** diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, seperti efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan BUMNag, atau dampak Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Putri. 2025. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Review Akuntasi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 9 No. 3.

Aji, Rahmad Nuryakin DKK. 2025. *Buku Ajar Pengantar Perbankan Syariah* (Filomedia Pustaka).

Agustina, Putri. 2025. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Review Akuntasi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 9 No. 3.

Aliya, Jihada Zahra Dkk. 2024."Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Margamukti Pangalengan Menurut Perspektif Islam As-Syirkah : *Islamic Economics & Finacial Journal*," Vol. 3. No. 6.

Amin, Fadillah. 2021. *Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, dan APBDes* (Deepublish Digital CV Budi Utama).

Ardha, Vanya. 2024. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Manajemen Keuangan Syariah (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat), Vol.8 No.2.

Arianto, Bambang dkk. 2024. Studi Fenomenologi Tata Kelola Dana Desa Berbasis Aplikasi Sistem keuangan desa, *Jurnal Akuntansi Auditing & Investasi*, Vol. 4 No. 2.

Ayu, Olivia Sari. 2023. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan keuangan Keuangan Desa

Buku Profil Nagari Padang Gelugur. 2024

Dara, Puspita Meliza. 2024. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan data Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Sumatera Barat Pada tahun 2017 terdapat 288 nagari dari 11 kabupaten di Sumatera Barat yang," Vol. 3. No. 4

Data Pendapatan Nagari Padang Gelugur 2024

Fahlevi, Reza. 2020. *Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Kuta Barat Kota Sabang* (Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry)

Fajar, Panuluh Garda. 2020. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana desa di Kecematan Dolopo Kabupaten Madiun*

Fauzi, Ahmad Dkk. 2025. *konsep Dasar Ekonomi dan Keuangan syariah*, oleh Takaza Innovatix Labs (IKAPI)

Fauzani, Dkk. 2024. *Teori Keadilan Distribusi Al-'sadr: Kepemilikan dan keadilan Distribusi Praproduksi Sumber Daya Mineral Di Indonesia* (CV. Bintang Semesta Media)

Firmansyah, 2024. *Metode Kualitatif Dalam Tinjauan Ekonomi dan Bisnis* (Deepublish Digital)

Halim, A. 2014. *Akuntasi Keuangan Daerah* (Salemba Empat).

Herion, Dkk. 2022. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Aspek pemberdayaan DiTinjau Dalam Persfektif Ekonomi Syariahq," *Jurnal Of Graduate Of Islamic Business And Ekonomisc*, Vol. 1. No. 1

Husna, Amalia. 2023. (Solo: Tinta Media, Creative Imprint Of Tiga Serangkai)

Husni, Ingratubun M. 2024. *Pengantar Ekonomi Syariah* (Reads Media Croup)

Intan, Permata Nur. 2023. "Analisis pengelolaan Dana Desa masaran Banyuates Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam," *Jurnal ISECO*, No. 1. No. 2.

Irawan, Feri Dkk. 2025. *Ekonomi Syariah (Teori & Aplikasi Ekonomi Islam)* (CV. Mega Press Nusantara)

Kartina, Remi. 2025. "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah)," *Jurnal Manajemen Modal Insani dan Bisnis*, Vol 6. No. 1.

Kantor Wali Nagari Padang Gelugur. 2026

"Kementerian Keuangan RI, 'Buku Pintar Desa'.

Kurdi, Sulaeman. 2024. Sistem Pengelolaan Dan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syaraiah, (Studi Kasus di Desa Kebondalem kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, (2024).

Konstanse, Oki Kamilaus. 2025. *Keuangan Daerah* (PT. Star Ditigal Publishing)

Lembaran, Tambahan, dan Negara Republik, 2, 2014.

Manandan, Wahyunadi Abdul. 2019. *BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa* (Inovasi Pembangunan Desa.

Meriani, Wulandari Sisca dkk. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang), *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 4.

Mulyadi Dkk. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Manajemen* (DOTPLUS Publidher)

Mu'iz, Raharjo Muhammad. 2020. *Pengelolaan Dana Desa* (PT Bumi Aksara)

Nova, Sulastri. 2016. *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam*

Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Wotupute Kabupaten Muna (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari)

Nurasila. 2023. "Skripsi efektivitas dan strategi pengelolaan dana desa untuk pembangunan di desa bunyu barat kecamatan bunyu,".

Nurbaiti dkk. 2022. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Sijabut Tratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan), Vol. 3 No. 1.

Nurcholis. Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga).

Nurjannah, Yulia dkk. 2022. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 8 No. 1.

Nyoman, Resmi Ni Dkk. 2022. *Pengantar manajemen* (CV. Bintang Semata Media).

Parida, Gina dkk. 2025. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pencegahan *Stunting* Di Desa Neglasari, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10. No. 2.

Pengelolaan, Dana Desa. 2023. dan Tambahan Lembaran, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa".

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1"

Pratama, Andre dkk. 2025. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2.

Priatna, Yeni Dkk. 2023. *Pengantar Akuntansi Sektor Publik Ragam Entitas dan Standar Akuntansinya* (Deepublish Digital, 2023)

Puansah, Irman ddk. 2024. Keadilan Sosial dalam Implementasi Kebijakan Dana

Desa, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4.

Putri Zakia Intan. 2024. *Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry)

Purnama, Wulan Dkk. 2022. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Di Desa Setalik Kecamatan Sejangkung Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Vol. 4 No. 1

Q.S Al-Baqarah (2) : 30

Q.S Al-Baqarah (2) : 165

Q.S An-Nisa (4) : 58

Q.S Al-Anfal : 27

Rangga, Bawono Icuk. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo), hal. 26.

Ramdani, Firli dkk. 2024. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Aspek Perencanaan Di Desa Pataruman, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntasi*, Vol. 10 No. 13.

Ridena, Koesherawaty Sutra dkk. 2024. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium*, Vol. 01 No. 2.

Risnawati, Heni. 2022. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol.6 No.1 (2022).

Rudi, Wijaya Muhammad. 2021. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, Vol.01 No.02

Rudia, A. 2021. *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian* (Bandung: Pustaka Tresna Bhakti).

Rustam dkk. 2021. Konsep Amanah Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance, *Jurnal ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol.7 No.2.

Rozalinda. 2017. *Teori dan Aplikasiya Pada Aktivitas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Sari, Lubis Delima Dkk. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam* (CV. Merdeka Kreasi Gruop)

Septianingsih. 2021. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Vol.16 No.1

Simbolon, Gallex. 2022. Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Tanatangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata), *Jurnal Prosi PLS Universitas Nusa Cendana*, Vol. 1 No. 2.

Sri, Rizki Asti Rieke. 2024. *Buku Ajar Audit Manajemen* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia).

Saat, Sulaiman. Pengantar Metedologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Muda, Edisi Revisi. (Sulawesi Selatan: Pulsaka Almaida), hal. 55

Sudarma, Made. 2024. *Manajemen Data*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia).

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hal.12.

Sulton, Dkk. 2024. *Dana Desa*. (Ruang Karya)

Sopriyanto. 2021. Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal), *Jurnal Perbankan & Manajemen Syariah*, Vol.3 No.1

Suwanda, Dadang Dkk. 2019. *Manajemen Risiko*. (PT. Remaja Rosdakarya).

Ulfah Ramadhani Andi. 2025. analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjani Selatan Kabupaten Sinjai, *Jurnal Of Economy Business Development*, Vol. 3 No. 2.

Wiharyono Dkk. 2025. Pengelolaan Dana Desa Untuk PemberdaayaanMasyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*. Vol.3 No.4

Wijaya, Hengki. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray)

LAMPIRAN PENELITIAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan judul " **Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)** yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Padang Gelugur, Adapun informannya ialah bapak/ibu Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, dan Masyarakat, Guna mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun pertanyaan yang akan di ajukan adalah sebagai berikut:

BIODATA NARASUMBER

1. Nama :
2. Pekerjaan:
3. Umur :

A. Pertanyaan Gambaran Umum

1. Kapan kantor wali Nagari ini berdiri secara resmi?
2. Bagaimana gambaran singkat mengenai sejarah terbentuknya kantor Wali Nagari ini?
3. Apa saja dasar hukum atau peraturan yang melandasi pembentukan Kantor Wali Nagari ini?
4. Apa saja visi dan misi kantor Wali Nagari ini dalam penyelenggaraan pemerintahan?
5. Berapa luas wilayah Nagari ini?
6. Berapa jumlah penduduk dan karakteristik Nagari Padang Gelugur ini (Usia, Pekerjaan, Pendidikan)?
7. Ada berapa jumlah jorong atau wilayah yang terdapat di Nagari ini?
8. Program utama apa saja yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di Kantor Wali Nagari ini?
9. Layanan apa saja yang tersedia dikantor Wali Nagari ini?
10. Berapa rata-rata jumlah masyarakat yang dilayani setiap hari?

B. Pertanyaan Gambaran Khusus

1. Pengelolaan Dana Desa

a. Perencanaan

1) Bagaimana Proses perencanaan program dan kegiatan di Nagari ini dilaksanakan?
2) Sejauh mana penyusunan dokumen perencanaan, seperti rencana kerja pemerintah nagari (RKP Nagari) dan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari) ?

b. Pelaksanaan

1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan di Nagari ini?
2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam tahap pelaksanaan, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

c. Transparansi

1) Bagaimana upaya Pemerintah Nagari dalam menyampaikan informasi terkait program dan pengelolaan anggaran kepada masyarakat secara terbuka?
2) Sejauh mana masyarakat diberikan akses untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Nagari?

d. Akuntabilitas

1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Nagari atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat maupun pihak yang terkait?
2) Apakah terdapat mekanisme pelaporan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin sebagai bentuk akuntabilitas Pengelolaan kegiatan Nagari?

e. Keadilan

1) Bagaimana Pemerintah Nagari memastikan bahwa pelaksanaan program dan kebijakaan dapat memberikan manfaat secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat?
2) Sejauh mana prinsip keadilan menjadi pertimbangan dalam penetapan prioritas program dan Alokasi Anggaran Nagari?

2. Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

a. Amanah

1) Bagaimana prinsip amanah diterapkan dalam Pengelolaan Dana Desa?
2) Sejauh mana Pengelolaan Dana Desa mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab Pemerintah Nagari?

b. Keadilan

1) Bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam proses pengalokasian Dana Desa agar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat?
2) Sejauh mana Dana Desa didistribusikan secara merata kepada masyarakat?

c. Tauhid

1) Bagaimana nilai-nilai tauhid seperti kejujuran dan tanggungjawab, tercermin dalam pengelolaan Dana Desa?
2) Sejauh mana nilai pertanggungjawaban kepada Allah SWT menjadi landasan etis dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa?

d. Maslahah/Manfaat

1) Bagaimana Dana Desa dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat?
2) Sejauh mana program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat?

e. Manusia (Khalifah)

1) Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia?
2) Sejauh mana program yang dilaksanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

3. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa

a. Kompetensi Sumber Daya yang Masih Kurang

1) Bagaimana kemampuan Aparatur Nagari dalam mengelola Dana Desa secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku?
2) Sejauh mana upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan untuk mendukung Pengelolaan Dana Desa?

b. Kurangnya Transparansi pengelolaan Dana Desa

1) Bagaimana praktik transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari ini?
2) Sejauh mana keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait Penggunaan Dana Desa telah dilaksanakan?

c. Adanya Hambatan Teknis

1) Apa saja hambatan teknis yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa?
2) Bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut?

d. Kurang Maksimal dalam Proses Audit dan Evaluasi

1) Bagaimana pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Desa?
2) Sejauh mana hasil audit dan evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan Pengelolaan Dana Desa?

e. Rendahnya pendidikan masyarakat

1) Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pemahaman terhadap Pengelolaan Dana Desa?
2) Sejauh mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa?

2. Transkip Wawancara

A. Jawaban Pertanyaan Gambaran Khusus

N1= Bapak Wali Nagari (Syafrial R. S.Pd)

Narasumber		Dialog Wawancara
Pewawancara	:	
N1	:	
Pewawancara	:	
N1	:	

N2= Bapak Sekretaris Nagari (Rahmad Hidayat)

Narasumber		Dialog Wawancara
Pewawancara	:	
N1	:	
Pewawancara	:	
N1	:	

N3= Bapak Usman (Masyarakat Nagari Padang Gelugur)

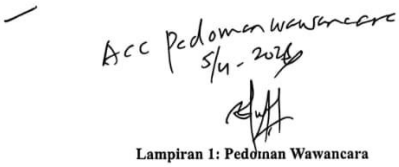
Narasumber		Dialog Wawancara
Pewawancara	:	
N1	:	
Pewawancara	:	
N1	:	

N4= Ibuk Asri (Masyarakat Nagari Padang Gelugur)

Narasumber		Dialog Wawancara
Pewawancara	:	
N1	:	
Pewawancara	:	
N1	:	

N5= Ibuk Masitoh (Masyarakat Nagari Padang Gelugur)

Narasumber		Dialog Wawancara
Pewawancara	:	
N1	:	
Pewawancara	:	
N1	:	



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan judul " Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman) yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Padang Gelugur, Adapun informannya ialah bapak/ibu Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, dan Masyarakat, Guna mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun pertanyaan yang akan di ajukan adalah sebagai berikut:

BIODATA NARASUMBER

1. Nama :
2. Pekerjaan:
3. Umur :

A. Pertanyaan Gambaran Umum

1. Kapan kantor wali Nagari ini berdiri secara resmi?
2. Bagaimana gambaran singkat mengenai sejarah terbentuknya kantor Wali Nagari ini?
3. Apa saja dasar hukum atau peraturan yang melandasi pembentukan Kantor Wali Nagari ini?
4. Apa saja visi dan misi kantor Wali Nagari ini dalam penyelenggaraan pemerintahan?
5. Berapa luas wilayah Nagari ini?
6. Berapa jumlah penduduk dan karakteristik Nagari Padang Gelugur ini (Usia, Pekerjaan, Pendidikan)?
7. Ada berapa jumlah jorong atau wilayah yang terdapat di Nagari ini?
8. Program utama apa saja yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di Kantor Wali Nagari ini?
9. Layanan apa saja yang tersedia dikantor Wali Nagari ini?
10. Berapa rata-rata jumlah masyarakat yang dilayani setiap hari?

3. Lampiran Sk Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 446.1/Un.26.3/HK.00.5/12/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Yenny Widia Astuty** NIM. **3222084** tanggal 04 Desember 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kaupaten Pasaman)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Khadijah Nurani, SE, M.Si**
NIP	:	199112212019032014
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 04 Desember 2025

Dekan,

ADE ALFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

4. Lampiran Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B-0900/Un.26.3/PP.07/05/2026 05 Mei 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Padang Gelugur
Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

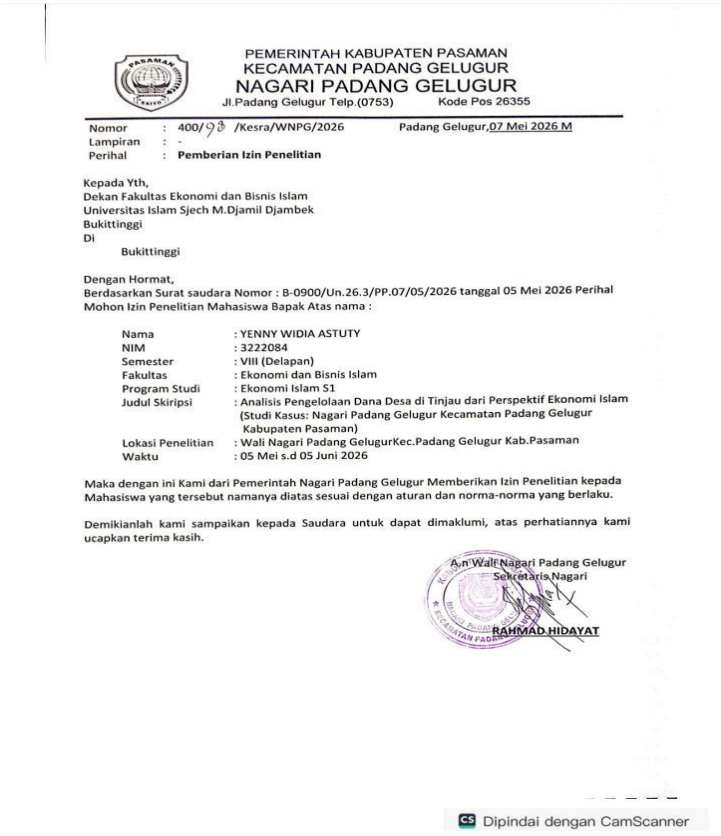
Nama	: **Yenny Widia Astuty**
NIM	: 3222084
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)"***
Lokasi Penelitian	: Wali Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman
Waktu	: 05 Mei s.d 05 Juni 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

5. Lampiran Surat Balasan Pemberian Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN PADANG GELUGUR
NAGARI PADANG GELUGUR
Jl.Padang Gelugur Telp.(0753) Kode Pos 26355

Nomor : 400/93 /Kesra/WNPG/2026 Padang Gelugur,07 Mei 2026 M
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Sjech M.Djamil Djambek
Bukittinggi
Di
Bukittinggi

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat saudara Nomor : B-0900/Un.26.3/PP.07/05/2026 tanggal 05 Mei 2026 Perihal Mohon Izin Penelitian Mahasiswa Bapak Atas nama :

Nama	: YENNY WIDIA ASTUTY
NIM	: 3222084
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skiripsi	: Analisis Pengelolaan Dana Desa di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)
Lokasi Penelitian	: Wali Nagari Padang GelugurKec.Padang Gelugur Kab.Pasaman
Waktu	: 05 Mei s.d 05 Juni 2026

Maka dengan ini Kami dari Pemerintah Nagari Padang Gelugur Memberikan Izin Penelitian kepada Mahasiswa yang tersebut namanya diatas sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.

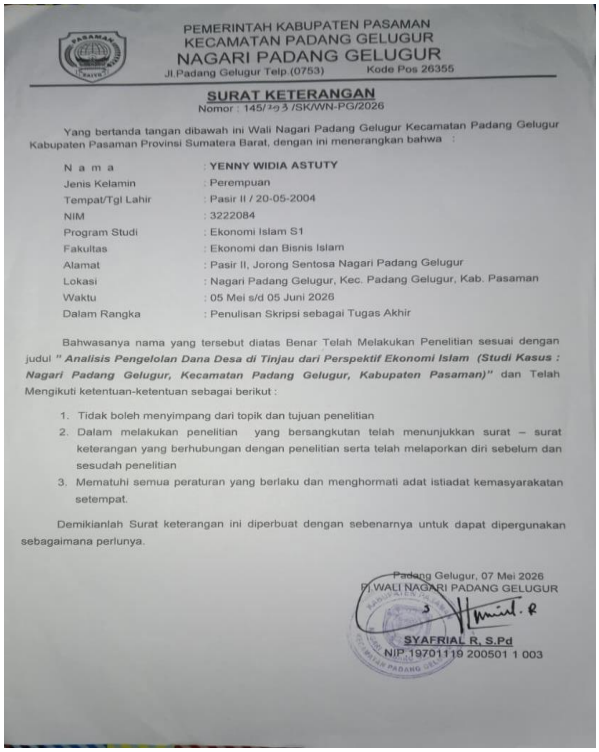
Demikianlah kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A.n Wali Nagari Padang Gelugur
Sekretaris Nagari

RAHMAD HIDAYAT

Dipindai dengan CamScanner

6. Lampiran Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN PADANG GELUGUR
NAGARI PADANG GELUGUR
Jl.Padang Gelugur Telp.(0753) Kode Pos 26355

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145/293 /SK/WN-PG/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: **YENNY WIDIA ASTUTY**
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl Lahir	: Pasir II / 20-05-2004
NIM	: 3222084
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat	: Pasir II, Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur
Lokasi	: Nagari Padang Gelugur, Kec. Padang Gelugur, Kab. Pasaman
Waktu	: 05 Mei s/d 05 Juni 2026
Dalam Rangka	: Penulisan Skripsi sebagai Tugas Akhir

Bahwasanya nama yang tersebut diatas Benar Telah Melakukan Penelitian sesuai dengan judul ***" Analisis Pengelolan Dana Desa di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)"*** dan Telah Mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

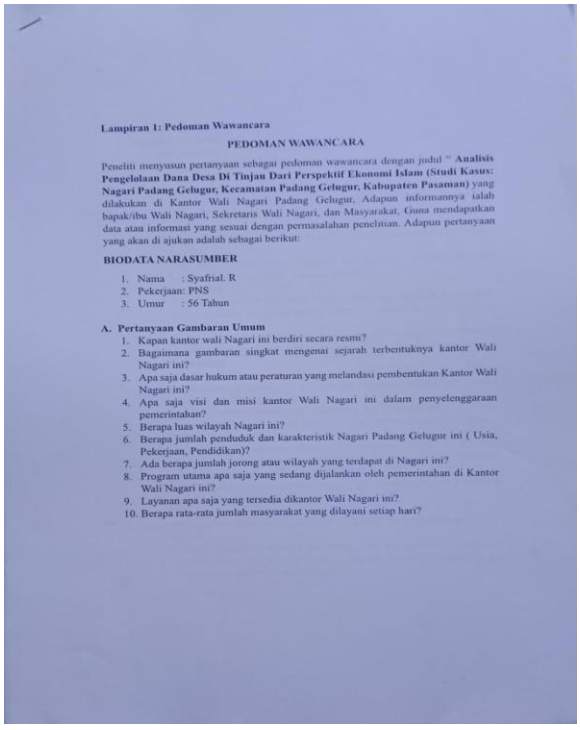
1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian
2. Dalam melakukan penelitian yang bersangkutan telah menunjukkan surat – surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian serta telah melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat kemasyarakatan setempat.

Demikianlah Surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padang Gelugur, 07 Mei 2026
PJ.WALI NAGARI PADANG GELUGUR

SYAFRIAL R, S.Pd
NIP 19701119 200501 1 003

7. Lampiran Surat Keterangan Wawancara



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan judul " **Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)** yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Padang Gelugur. Adapun informannya ialah bapak/ibu Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, dan Masyarakat. Guna mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun pertanyaan yang akan di ajukan adalah sebagai berikut:

BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Syafrial. R
2. Pekerjaan: PNS
3. Umur : 56 Tahun

A. Pertanyaan Gambaran Umum

1. Kapan kantor wali Nagari ini berdiri secara resmi?
2. Bagaimana gambaran singkat mengenai sejarah terbentuknya kantor Wali Nagari ini?
3. Apa saja dasar hukum atau peraturan yang melandasi pembentukan Kantor Wali Nagari ini?
4. Apa saja visi dan misi kantor Wali Nagari ini dalam penyelenggaraan pemerintahan?
5. Berapa luas wilayah Nagari ini?
6. Berapa jumlah penduduk dan karakteristik Nagari Padang Gelugur ini (Usia, Pekerjaan, Pendidikan)?
7. Ada berapa jumlah jorong atau wilayah yang terdapat di Nagari ini?
8. Program utama apa saja yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di Kantor Wali Nagari ini?
9. Layanan apa saja yang tersedia dikantor Wali Nagari ini?
10. Berapa rata-rata jumlah masyarakat yang dilayani setiap hari?

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan judul " **Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)** yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Padang Gelugur. Adapun informannya ialah bapak/ibu Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, dan Masyarakat. Guna mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun pertanyaan yang akan di ajukan adalah sebagai berikut:

BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Rahmad Hidayat
2. Pekerjaan: Sekretaris Nagari
3. Umur : 46 Tahun

A. Pertanyaan Gambaran Umum

1. Kapan kantor wali Nagari ini berdiri secara resmi?
2. Bagaimana gambaran singkat mengenai sejarah terbentuknya kantor Wali Nagari ini?
3. Apa saja dasar hukum atau peraturan yang melandasi pembentukan Kantor Wali Nagari ini?
4. Apa saja visi dan misi kantor Wali Nagari ini dalam penyelenggaraan pemerintahan?
5. Berapa luas wilayah Nagari ini?
6. Berapa jumlah penduduk dan karakteristik Nagari Padang Gelugur ini (Usia, Pekerjaan, Pendidikan)?
7. Ada berapa jumlah jorong atau wilayah yang terdapat di Nagari ini?
8. Program utama apa saja yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di Kantor Wali Nagari ini?
9. Layanan apa saja yang tersedia dikantor Wali Nagari ini?
10. Berapa rata-rata jumlah masyarakat yang dilayani setiap hari?

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan judul " **Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)** yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Padang Gelugur. Adapun informannya ialah bapak/ibu Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, dan Masyarakat. Guna mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun pertanyaan yang akan di ajukan adalah sebagai berikut:

BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Usman
2. Pekerjaan: Karyawan Honorer
3. Umur : 46 Tahun

A. Pertanyaan Gambaran Umum

1. Kapan kantor wali Nagari ini berdiri secara resmi?
2. Bagaimana gambaran singkat mengenai sejarah terbentuknya kantor Wali Nagari ini?
3. Apa saja dasar hukum atau peraturan yang melandasi pembentukan Kantor Wali Nagari ini?
4. Apa saja visi dan misi kantor Wali Nagari ini dalam penyelenggaraan pemerintahan?
5. Berapa luas wilayah Nagari ini?
6. Berapa jumlah penduduk dan karakteristik Nagari Padang Gelugur ini (Usia, Pekerjaan, Pendidikan)?
7. Ada berapa jumlah jorong atau wilayah yang terdapat di Nagari ini?
8. Program utama apa saja yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di Kantor Wali Nagari ini?
9. Layanan apa saja yang tersedia dikantor Wali Nagari ini?
10. Berapa rata-rata jumlah masyarakat yang dilayani setiap hari?

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan judul " **Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)** yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Padang Gelugur, Adapun informannya ialah bapak/ibu Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, dan Masyarakat, Guna mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun pertanyaan yang akan di ajukan adalah sebagai berikut:

BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Asri
2. Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
3. Umur : 38 Tahun

A. Pertanyaan Gambaran Umum

1. Kapan kantor wali Nagari ini berdiri secara resmi?
2. Bagaimana gambaran singkat mengenai sejarah terbentuknya kantor Wali Nagari ini?
3. Apa saja dasar hukum atau peraturan yang melandasi pembentukan Kantor Wali Nagari ini?
4. Apa saja visi dan misi kantor Wali Nagari ini dalam penyelenggaraan pemerintahan?
5. Berapa luas wilayah Nagari ini?
6. Berapa jumlah penduduk dan karakteristik Nagari Padang Gelugur ini (Usia, Pekerjaan, Pendidikan)?
7. Ada berapa jumlah jorong atau wilayah yang terdapat di Nagari ini?
8. Program utama apa saja yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di Kantor Wali Nagari ini?
9. Layanan apa saja yang tersedia dikantor Wali Nagari ini?
10. Berapa rata-rata jumlah masyarakat yang dilayani setiap hari?

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan judul " **Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)** yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Padang Gelugur, Adapun informannya ialah bapak/ibu Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, dan Masyarakat, Guna mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun pertanyaan yang akan di ajukan adalah sebagai berikut:

BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Masitoh
2. Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
3. Umur : 35 Tahun

A. Pertanyaan Gambaran Umum

1. Kapan kantor wali Nagari ini berdiri secara resmi?
2. Bagaimana gambaran singkat mengenai sejarah terbentuknya kantor Wali Nagari ini?
3. Apa saja dasar hukum atau peraturan yang melandasi pembentukan Kantor Wali Nagari ini?
4. Apa saja visi dan misi kantor Wali Nagari ini dalam penyelenggaraan pemerintahan?
5. Berapa luas wilayah Nagari ini?
6. Berapa jumlah penduduk dan karakteristik Nagari Padang Gelugur ini (Usia, Pekerjaan, Pendidikan)?
7. Ada berapa jumlah jorong atau wilayah yang terdapat di Nagari ini?
8. Program utama apa saja yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di Kantor Wali Nagari ini?
9. Layanan apa saja yang tersedia dikantor Wali Nagari ini?
10. Berapa rata-rata jumlah masyarakat yang dilayani setiap hari?

8. Lampiran Dokumentasi Peneliti

Wawancara Bersama Bapak Syafrial R Sebagai Kepala Wali Nagari Padang Gelugur




Wawancara Bersama Bapak Rahmad Hidayat Sebagai Sekretaris Wali Nagari Padang Gelugur




Wawancara Bersama Bapak Usman Sebagai Masyarakat Wali Nagari Padang Gelugur





Wawancara Bersama Ibuk Asri Sebagai Masyarakat Wali Nagari Padang Gelugur





Wawancara Bersama Ibuk Masitoh Sebagai Masyarakat Wali Nagari Padang Gelugur



